

**KONTRIBUSI DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN
USAHA USAHA MIKRO DALAM MENINGKATKAN DAYA
SAING PARA PEDAGANG DI PASAR LEGI PONOROGO**

PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

SKRIPSI



Oleh :

Susanti

NIM 401180322

JURUSAN EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2022

ABSTRAK

Susanti. Kontribusi Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Dalam Meningkatkan Daya Saing Para Pedagang Di Pasar Legi Ponorogo Perspektif Ekonomi Islam. *Skripsi*. 2022. Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.

Kata Kunci: Dinas perdagangan, perspektif ekonomi islam.

Keberadaan pasar modern membuat pasar tradisional semakin terpuruk. Banyaknya Mall yang dibangun oleh pemerintah seperti Luwes, Poper, Keraton, dan Minimarket lainnya semakin terdesak. Banyaknya E-Commerce yang sekarang tengah booming juga membuat pedagang banyak kehilangan pelanggan. Oleh sebab itu pemerintah perlu melakukan adanya kebijakan dimana kebijakan tersebut mampu membuat para pedagang menghadapi daya saing ditengah banyaknya pasar modern.

Tujuan utama penelitian pada Dinas perdagangan Kabupaten Ponorogo ini mengacu pada peningkatan kesejahteraan masyarakat atau pelaku usaha dalam pespektif ekonomi islam, dimana dengan adanya campur tangan dari pemerintah mampu memberikan taraf hidup yang lebih layak kepada pelaku usaha. Untuk menganalisa peran dan strategi pemerintah khususnya pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo dalam pengelolaan dan pengembangan pasar tradisional, serta merumuskan sebuah strategi sebagai pengembangan pasar tradisional khususnya Pasar Legi sehingga mampu bersaing dengan pasar modern. Dengan metode penelitian lapangan (*field research*).

Hasil penelitian pada Kontribusi Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Dalam Meningkatkan Daya Saing Para Pedagang Di Pasar Legi Ponorogo Perspektif Ekonomi Islam yaitu Peran Dinas Industri perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro dalam mempertahankan daya saing para pelaku usaha atau para pedagang dipasar legi Kabupaten Ponorogo adalah dengan cara melakukan pembinaan dan penataan pasar, sehingga dengan adanya program yang telah dibuat oleh pemerintah dan atas persetujuan para pelaku usaha maka program yang dibuat dapat dilaksanakan. Meskipun pada awalnya sulit untuk direalisasikan namun lama kelamaan program yang dibuat oleh pemerintah dibawah naungan Dinas Perdagangan dapat diterapkan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:


NO	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL
1	Susanti	401180322	Ekonomi Syariah	Kontribusi Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro dalam Meningkatkan Daya Saing Para Pedagang Di Pasar Legi Kabupaten Ponorogo Perspektif Ekonomi Islam

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 07 September 2022

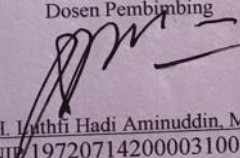
Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah


Dr. Luhur Prasetyo, M.E.I.
NIP 197801122006041002

Menyetujui,

Dosen Pembimbing


Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.
NIP 197207142000031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Kontribusi Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Dalam Meningkatkan Daya Saing Para Pedagang Di Pasar Legi Ponorogo Perspektif Ekonomi Islam

Nama : Susanti

NIM : 401180322

Jurusan : Ekonomi Syariah

Telah diujikan dalam sidang Ujian Skripsi oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

Dewan Penguji:

Ketua Sidang
Unun Roudlotul Jannah, M.Ag.
NIP 197507162005012004

:
(.....)

Penguji I
Dr. Luhur Prasetyo, M.E.I
NIP 197801122006041002

:
(.....)

Penguji II
Dr. H. Lutfi Hadi Aminuddin, M.Ag
NIP 197207142000031005

:
(.....)

Ponorogo, 21 September 2022

Dikesahkan,
Dekan F.E.B.I IAIN Ponorogo
Lutfi Hadi Aminuddin, M.Ag.
NIP 197207142000031005



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Susanti

NIM : 401180322

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Kontribusi Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Dalam Meningkatkan Daya Saing Para Pedagang Dipasar Legi Ponorogo Perspektif Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di theses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 11 November 2022

Penulis



Susanti

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Susanti

NIM : 401180322

Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**KONTRIBUSI DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO
DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING PARA PEDAGANG DI PASAR
LEGI KABUPATEN PONOROGO
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sastra saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya.

Ponorogo, 07 September 2022

Pembuat Pernyataan,


Susanti

NIM: 401180322

DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Studi Penelitian Terdahulu.....	9
F. Metode Penelitian	13
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	13
2. Kehadiran Penelitian	14
3. Lokasi Penelitian.....	15
4. Data dan Sumber Data	16
5. Teknik Pengumpulan Data.....	17

6. Teknik Pengolahan Data	18
7. Analisis Data	18
8. Sistematika Pembahasan	20

BAB II. KAJIAN TEORI

A. Peran Pemerintah dalam Perspektif Ekonomi Islam	22
B. Strategi Pemerintah dalam Peningkatan Daya Saing Pedagang	32
C. Peran Pemerintah Terhadap Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam	45

BAB III. PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING PEDAGANG PASAR LEGI KABUPATEN PONOROGO

A. Deskripsi Umum Tentang Pasar Legi	53
B. Peran Pemerintah Dalam Pelaksanaan Kebijakan.....	62
C. Strategi yang Digunakan Dalam Pelaksanaan Kebijakan	66
D. Dampak Kebijakan Pemerintah	69

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Peran Pemerintah	75
B. Analisis Strategi Pemerintah dalam Peningkatan Daya Saing	79
C. Analisis Dampak Kebijakan Pemerintah Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam	81

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Saran/Rekomendasi.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN.....	93
RIWAYAT HIDUP	98



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar dalam Islam, adalah pasar yang didalamnya diterapkan nilai-nilai Islam, seperti jual beli yang sah menurut syara' harus memiliki rukun dan syarat yang sesuai dengan islam, yaitu terdapat akad, orang yang berakad, barang yang diperjual-belikan serta terdapat nilai tukar pengganti barang. Adapun syarat orang yang berakad adalah: berakal (baligh dan dewasa) tanpa paksaan (sama-sama rela) mumayyiz, sedangkan syarat barang yang diperjual-belikan harus halal dan baik, bermanfaat menurut syara', tidak ditaklikan, serta barang tersebut milik sendiri.¹ Selain hal diatas pasar dalam islam tidak boleh adanya riba, ketidakjelasan, penipuan dan lain lain.

Hakikatnya Ekonomi Islam adalah metamorfosa dari nilai-nilai dalam Islam yang mengajarkan tentang masalah-masalah ekonomi dalam kehidupan manusia.² Kata Islam setelah “ekonomi” dalam ungkapan ekonomi Islam berfungsi sebagai identitas yang menandakan adanya prinsip-prinsip keislaman dalam berekonomi. Dalam bahasa Arab istilah ekonomi disebut dengan kata *al-iqtisad*, yang artinya kesederhanaan, dan kehematan.³ Dari kata *al-iqtisad* berkembang menjadi sebuah makna ‘ilm

¹ Nizaruddin, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Idea Sejahtera, 2013), 92.

² Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 1.

³ Amirudin, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Makassar: Alauddin University Press , 2014),

'iqtisad yaitu ilmu yang berkaitan dengan membahas masalah-masalah ekonomi.

Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berorientasi rahmatan lil alami. Dalam Ekonomi Islam tujuan bisnis tidak selalu untuk mencari profit tetapi harus dapat memperoleh dan memberikan benefit atau keuntungan dan manfaat non-materi, baik bagi si pelaku bisnis sendiri maupun pada lingkungan yang lebih luas, seperti terciptanya suasana persaudaraan, dan kepedulian sosial dan sebagainya.

Sebagai aktifitas ekonomi, pasar tidak bisa lepas dari kebutuhan manusia, serta manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Oleh sebab itu, manusia membutuhkan sebuah sistem yang membuat mereka bekerjasama dalam memenuhi kebutuhannya.⁴ Namun, sistem tersebut di nilai dan di rasa menyulitkan dengan alasan tidak semua manusia memiliki kebutuhannya. Selain itu, barter juga tidak memiliki sistem yang bisa di ukur sehingga akan berdampak secara luas, baik dari sisi wilayah maupun waktu.⁵ Hal inilah yang kemudian mendorong terjadinya pasar, sebagai tempat pertemuan orang-orang yang memiliki kebutuhan berbeda untuk di barter maupun menjualnya kepada pedagang, sebagaimana pernah di lakukan para rasul yang di kisahkan Allah dalam Q.S. Al-Furqan/25:20 yang artinya: dan Kami tidak mengutus Rasul-Rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-

⁴ Jaribah bin Ahmad AL-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin AL-Khatab* (Jakarta: Khalifah,2006), 599.

⁵ Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 66.

pasar. dan Kami jadikan sebahagian kamu cobaan bagi sebahagian yang lain. Maukah kamu bersabar dan adalah Tuhanmu Maha melihat.⁶

Imam Al-Ghazali juga telah menjelaskan pentingnya keberadaan pasar. Menurut Al-Ghazali, pasar merupakan tempat yang muncul secara alami, di dorong oleh ketersediaan terhadap sesuatu. Seperti tempat yang menyediakan penyimpanan alat-alat di satu pihak dan tempat penyimpanan hasil pertanian di lain pihak.⁷

Ekonomi Islam itu sendiri membahas perspektif ekonomi Islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus kita perhatikan, yaitu: ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam, yang bersumber dari syariatnya. Dan hal ini baru dari satu sisi. Sedangkan dari sisi lain adalah Al-Qur'an al-Karim dan As-sunnah Nabawiyah yang berbahasa Arab. Oleh karena itu, berbagai terminologi dan substansi ekonomi yang sudah ada, haruslah dibentuk dan disesuaikan terlebih dahulu dalam kerangka Islami. Atau dengan kata lain, harus digunakan kata dan kalimat dalam bingkai lughawi. Supaya dapat disadari pentingnya titik permasalahan ini. Karena dengan gamblang, tegas dan jelas mampu memberikan pengertian yang benar tentang istilah kebutuhan, keinginan dan kelangkaan dalam upaya memecahkan problemika ekonomi manusia. Pada hakikatnya ekonomi Islam adalah metamorfosa dan nilai-nilai dalam Islam yang mengajarkan tentang masalah-masalah ekonomi dalam

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2005), 16.

⁷ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Perss, 2004), 45.

kehidupan manusia. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berorientasi rahmatan lil 'alamin. Dalam ekonomi Islam tujuan bisnis tidak selalu untuk mencari profit tetapi juga harus memperoleh dan memberikan benefit atau keuntungan dan manfaaat non-materi bagi si pelaku bisnis sendiri maupun pada lingkungan yang lebih luas, seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial dan sebagainya.⁸

Berdasarkan praktek yang telah berlangsung lama tersebut, para pemikir memahami pasar sebagai sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Namun secara sederhana orang-orang lebih mendefinisikan pasar sebagai tempat pertemuan antara produsen dan konsumen untuk mengadakan transaksi.⁹ Adapun pengakuan terhadap adanya peran Negara dalam ilmu ekonomi di mulai dari kesadaran ekonomi makro untuk menggunakan entitas Negara sebagai salah satu dasar analisis. Sehingga hal ini membuktikan Negara menjadi representasi individu-individu dalam mencapai tujuan ekonomi kolektif, meski para ekonomi dengan cepat memahami adanya sebuah jurang kesengajaan yang berpotensi untuk menyesatkan perjalanan arah ilmu ekonomi yang telah menganga di depan mata.¹⁰ Berawal dari kesadaran itu pula lahir berbagai doktrin maupun pemahaman tentang peran pemerintah terhadap pasar, seperti paham sosialis dan kapitalis.

⁸ Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 1.

⁹ Mashuyhuri, *Ekonomi Mikro* (Malang: UIN Malang Perss, 2007), 199.

¹⁰ Fahri Hamzah, *Negara Pasar dan Rakyat*, Cet. 11 (Jakarta: Yayasan Faham Indonesia, 2011), 224.

Dalam Islam sendiri, Negara berperan mengatur pasar dan pelaku usaha agar tidak terjadi persaingan pasar yang tak sehat, dan bertanggung jawab atas pengelolaan pasar. Jika kondisi persaingan telah mengakibatkan kesengajaan antar pelaku usaha maka Negara juga berkewajiban untuk meningkatkan daya saing pasar dengan program pemberdayaan pembangunan.¹¹

Seiring berjalannya waktu, perkembangan pasar semakin pesat, hingga akhirnya pasar diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, seperti pasar modern, pasar saham dan pasar tradisional. Keberadaan pasar tradisional semakin terdesak oleh banyaknya pasar modern atau pusat perbelanjaan yang dibangun pemerintah. Banyaknya mall yang dibangun semakin membuat pasar tradisional terlupakan. Apalagi di tambah dengan adanya anggapan dari sebagian kalangan bahwa pasar tradisional itu kotor dan barang yang di jual itu tidak berkualitas. Pasar tradisional merupakan *slum area* (kawasan kumuh) sedangkan di mall bersih dan *public service*-nya memuaskan. Jika di amati sebenarnya banyak sekali yang bisa di dapatkan dari pasar tradisional. Di pasar tradisional terdapat suatu komunikasi yang tidak akan di temui di pasar modern dan di mall. Di pasar tradisional di berikan tawar menawar dalam transaksi jual belinya membuat suatu hubungan tersendiri antara penjual dan pembeli. Sopan santun merupakan strategi dan kunci sukses penjualan, meskipun tidak mengesampingkan kualitas barang dan harga.

¹¹ Muhamad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, cet, III (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 92.

Barang di pasar tradisional juga tidak kalah dengan pasar modern. Mulai dari kehidupan sehari-hari seperti sayur dan buah-buahan juga banyak yang bagus dan masih segar-segar, untuk bahan juga beragam mulai dari yang harganya rendah sampai yang tinggi, sehingga pembeli biasa menyesuaikan dengan budget yang ada. Berbeda dengan pasar modern, disana harga sudah di tetapkan dan tidak ada komunikasi antara penjual dan pembeli. Dengan demikian keberadaan pasar tradisional harus di pertahankan karena terdapat nilai-nilai yang tidak terdapat pada pasar modern dan perlu untuk di lestarikan. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari peran pemerintah sebagai pembinanya. Pada Kota Ponorogo sendiri ada beberapa pasar modern yang telah berdiri yang menjadi pemicu persaingan dengan pasar legi diantaranya ada Luwes, Keraton, Poper, Bintang Swalayan, Minimarket seperti Indomaret dan Alfamart, serta banyaknya E-commerce yang sekarang tengah booming bisa menjadi pemicu utama persaingan dengan pedagang pasar tradisional. Oleh sebab itu pemerintah khususnya Dinas Perdagangan membuat suatu kebijakan yaitu kebijakan relokasi dan kebijakan alokasi, dimana Dinas perdagangan berperan dalam membantu mengentaskan kembali perekonomian pedagang pasar legi dan Dinas Perdagangan juga menggunakan beberapa strategi yang dianggap mampu membantu dalam pelaksanaan kebijakan. Dari kebijakan yang telah dibuat oleh Dinas Perdagangan diharapkan mampu dalam memberikan dampak baik terhadap masyarakat khususnya pedagang pasar legi dan mampu menstabilkan perekonomian yang kian terpuruk ditengah

banyaknya pasar modern dan E-commerce yang telah banyak digandrungi oleh masyarakat dengan tingkat kenyamanan yang lebih baik lagi.

Pasar Legi terletak di dekat pusat kota Ponorogo. Namanya beralih menjadi pasar Songgolangit setelah mengalami kebakaran pada tahun 2000, pasar ini merupakan pusat utama kegiatan jual beli masyarakat Ponorogo dan sekitarnya. Para pedagang dari beberapa daerah sekitar seperti Madiun, Pacitan, dan Trenggalek juga sering melakukan kegiatan jual beli di pasar ini. Adanya kebakaran yang kembali menimpa pasar Songgolangit pada tanggal 15 Mei 2017 menyebabkan banyak kios yang ada di dalam pasar terbakar, jumlah kios yang terbakar ada sekitar 400 kios. Dengan adanya kejadian tersebut pengelola pasar melakukan kegiatan relokasi pasar agar para pedagang dapat berjualan kembali yaitu dari lokasi pasar songgolangit yang sebelumnya terbakar berpindah ke lokasi Eks RSUD Dr. Harjono yang beralamat di jalan Cipto Mangunkusumo, Kelurahan Keniten, Kecamatan Ponorogo. Berdasarkan pemberitaan Kominfo Ponorogo, pada hari Rabu 2 Januari 2019 para pedagang mulai pindah ke tempat relokasi Eks RSUD Dr. Harjono dan mulai berjualan. Pada tahun 2021 peresmian digedung yang baru namanya berganti lagi menjadi pasar Legi.¹²

Pasar tradisional Legi berpotensi dalam meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat dalam hal ini pedagang yang ada di pasar tersebut. Dengan berdagang di pasar Legi pedagang dapat meningkatkan kualitas

¹² Wahyudin, *Wawancara*, 07 Desember 2021.

hidupnya. Berdagang dipasar Legi merupakan salah satu usaha dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat sekitaran Ponorogo. Pertumbuhan ekonomi adalah keadaan dimana seseorang yang sebelumnya belum mempunyai penghasilan uang yang lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, hingga mampu mendapatkan penghasilan yang lebih dari cukup. Sebagian besar masyarakat setempat mendapatkan penghasilan dari sebagai pedagang di pasar tradisional. Dengan adanya usaha yang demikian diharapkan bisa meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat, khususnya di sekitaran Ponorogo yang lebih baik dari sebelumnya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul: Kontribusi Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro dalam Meningkatkan Daya Saing Para pedagang di Pasar Legi Kabupaten Ponorogo Perspektif Ekonomi Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Dinas Industri Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo dalam mempertahankan daya saing pedagang Pasar Legi Ponorogo?
2. Apa strategi yang digunakan oleh Dinas Industri perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan daya saing pedagang pasar tradisional?

3. Bagaimana dampak dari pelaksanaan kebijakan Dinas Industri perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro di Pasar Legi Kabupaten Ponorogo ditinjau menurut perspektif ekonomi Islam?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisa peran pemerintah oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dalam peningkatan daya saing pedagang pasar tradisional Legi di Ponorogo.
2. Untuk menganalisis strategi yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro dalam membantu meningkatkan daya saing pedagang pasar tradisional Legi di Ponorogo.
3. Untuk menganalisis dampak dari pelaksanaan kebijakan Dinas Industri Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro dipasar tradisional Legi Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Akademik

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kajian mengenai perspektif ekonomi islam, khususnya pengetahuan yang berkaitan dengan kontribusi Dinas Perdagangan untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional di Pasar Legi daerah Kabupaten Ponorogo.

- b. Sebagai tambahan pengetahuan bagi peneliti mengenai perspektif ekonomi islam tentang dampak yang terjadi ketika peningkatan daya saing pasar terlaksana.

E. Studi Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan saat ini. Berikut ini beberapa hasil penelitian yang relevan yang dijadikan bahan telaah bagi peneliti.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Ramona Asih Lestari tahun 2017, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwoketo dengan judul “Strategi Pengembangan Pasar Rakyat di Kabupaten Banyumas”. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah strategi pengembangan pasar rakyat di Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan program pengembangan pasar tradisional yang dilakukan Pemerintah Banyumas dalam rangka meningkatkan kepuasan pedagang melalui revitalisasi pasar tradisional bertujuan meningkatkan daya saing pasar dan mengaktifkan kembali kegiatan pasar tradisional agar dapat bersaing dengan pasar modern sehingga bukan hanya meningkatkan pendapatan pedagang tapi juga meningkatkan daya saing untuk memperluas pangsa pasar, dan tujuan akhir dari program tersebut adalah mencapai kesejahteraan pedagang. Revitalisasi tersebut menghasilkan empat aspek diantaranya aspek sosial, aspek non-fisik, aspek ekonomi dan aspek fisik. Analisis strategi pengembangan pasar dalam meningkatkan kepuasan pedagang di pasar

Kliwon Karanglewas Banyumas mencakup empat aspek diantaranya aspek sosial, aspek non-fisik, aspek ekonomi dan aspek fisik. Dari analisis keempat aspek tersebut para pedagang merasa belum puas, karena sistem penindak lanjutan keluhan dan saran yang lambat, sarana dan prasarana yang belum optimal dan kesejahteraan pedagang dalam hal pendapatan tidak maksimal. Hal ini, tidak sesuai dengan anjuran Islam yang mengajarkan bahwa setiap kebijaksanaan, keputusan, peraturan, perundangan-undangan yang dibuat oleh lembaga negara harus memuat hal yang dapat memelihara dan mewujudkan kemaslahatan umat.¹³

Kedua, skripsi yang ditulis oleh yaitu Besse Sahriana Darti 2019 Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dengan judul penelitian “Pemerintah dan Penguatan Ekonomi Masyarakat dalam Merekonstruksi Pasar Tradisional di Kabupaten Wajo”. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu 1) Bagaimana peran pemerintah dalam merekonstruksi pasar tradisional di kelurahan kabupaten wajo, 2) Bagaimana respon masyarakat pasca rekonstruksi pasar tradisional di Kabupaten wajo, 3) Bagaimana dampak secara ekonomi masyarakat pasca rekonstruksi pasar tradisional di Kabupaten Wajo. Keberadaan pasar di Kelurahan Siwa sebagai pasar tradisional memberikan dampak dari segi ekonomi karena berperan dalam membuka lapangan kerja secara luas dan menciptakan pendapatan bagi sebagian pekerja pendapatan rendah. Sehingga implikasinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta

¹³ Ramon asih Lestari, “Pengembangan Pasar Rakyat di Kabupaten Banyumas,” *Skripsi* (Purwokero: IAIN Purwokerto, 2017), 32.

mengurangi kemiskinan dan memperbaiki distribusi pendapatan. Upaya pendapatan pun dilakukan dengan kerja keras untuk efektifitas pengelolaan retribusi karena masih konvensional dan sistem berjalan. Sebagai salah satu roda pemerintahan di Kelurahan Siwa dengan menambah pendapatan daerah, pasar yang menyediakan kebutuhan harian.¹⁴

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Monika Lestari Universitas Gadjah Mada dengan judul “Peran Pemerintah dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Pasar Tradisional”. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah peran Pemerintah Kabupaten Bantul dalam meningkatkan daya saing pasar tradisional di Pasar Piyungan, Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul. Program pembinaan pasar yang menyangkut perbaikan perilaku dan pemanfaatan fasilitas pasar dari pihak pengelola pasar merupakan salah satu peran pemerintah sebagai fasilitator. Yaitu peran pemerintah dalam memberikan fasilitas-fasilitas yang dapat membantu keberlangsungan para pedagang dan para pembeli di pasar tradisional Piyungan. Selain bangunan pasar yang penting untuk meningkatkan daya saing pasar, sumber daya manusia yang tangguh dan berkualitas juga merupakan salah satu modal yang baik untuk dapat mengembangkan sebuah pasar. Hal ini tak hanya dilihat dari manajemen pengelola pasar tetapi juga dari sisi pedagang sebagai pelaku yang

¹⁴ Besse Sahriana Darti, “Pemerintah dan Penguatan Ekonomi Masyarakat dalam Merekonstruksi Pasar Tradisional di Kabupaten Wajo,” *Skripsi* (UIN Alauddin Makassar, 2019), 58.

langsung berhubungan dengan konsumen akhir. Hal ini dapat dilihat dari pengelola pasar yang telah memikirkan kenyamanan dan kepentingan pedagang dan pengunjung pasar terutama dalam hal kemampuan pengelola dalam merawat sarana fisik, fasilitas umum, penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang baik, transparan dalam pengelolaan dana, terutama dana retribusi yang dipungut dari para pedagang, dan mengakomodir kepentingan pedagang informal disekitar pasar.¹⁵

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Defri Handriyan 2019 Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “Peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dalam Mewujudkan Kebersihan Dan Ketertiban Pasar Di Kota Pekanbaru”. Dengan rumusan masalah penelitian yaitu 1) Bagaimanakah Peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam mewujudkan ketertiban dan kebersihan pasar di Kota Pekanbaru, 2) Apa saja Faktor Penghambat Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam mewujudkan ketertiban dan kebersihan pasar di Kota Pekanbaru. Upaya pemerintah dalam mengelola dan membina pasar tradisional pembangunan nasional bagi bangsa Indonesia salah satunya menghasilkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Hal ini ikut serta mendorong usaha perpasaran tumbuh dengan pesat. Tumbuhnya usaha perpasaran dengan pesat mewujudkan bahwa semakin tingginya kebutuhan akan tempat usaha bagi masyarakat dan semakin meningkat serta beragamnya keinginan konsumen untuk menentukan tempat berbelanja. Peran dinas pasar dalam

¹⁵ Monika Lestari, “Peran Pemerintah dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Pasar Tradisional di kabupaten Bantul,” *Skripsi* (Bantul: Universitas Gadjah Mada Bantul, 2017), 54.

mengelolah pasar daerah yaitu memberikan tata pemberian izin dan pemakaian tempat berjualan, melaksanakan dan mengawasi kebersihan dan ketertiban pasar, dan melaksanakan ketentuan retribusi dan pemeliharaan pasar. Sebagaimana yang di atur pada Peraturan Walikota Nomor 114 Tahun 2016.¹⁶

Berdasarkan penelitian diatas perbedaan dengan yang penulis teliti, fokus penelitian diatas lebih mengarah pada pengembangan pasar maupun kontribusi Dinas Perdagangan dalam lingkup umum atau konvensional, sedangkan penulis memfokuskan penelitian pada kontribusi Dinas Perdagangan untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional di pasar legi Kabupaten Ponorogo menggunakan perspektif ekonomi islam.

F. Metode Penelitian

a. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian yang memberikan informasi berupa data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis maupun lisan dari pedagang di pasar legi dan perilaku yang telah mereka alami terhadap kontribusi dari Dinas Perdagangan Daerah Ponorogo untuk membantu meningkatkan daya saing pasar tradisional pasar legi.

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan oleh masyarakat di pasar legi, Kabupaten Ponorogo menggunakan jenis penelitian *field research*

¹⁶ Defri Handriyan, "Peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dalam Mewujudkan Kebersihan Dan Ketertiban Pasar Di Kota Pekanbaru," *Skripsi* (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), 34.

(penelitian lapangan). Dimana dalam mencari data dilakukan secara langsung dengan melihat objek yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis berperan sebagai subjek (pelaku) penelitian. Peneliti melakukan kegiatan penelitian di Kabupaten Ponorogo untuk meneliti tentang kontribusi Dinas perdagangan dalam kontribusi dalam meningkatkan daya saing pasar tradisional. Dilihat dari jenis datanya penelitian ini tergolong penelitian kualitatif.¹⁷

b. Kehadiran Penelitian

Kehadiran peneliti sebagai pengamat atau pencari informasi yang paling penuh, dimana peneliti melakukan pengamatan, mengumpulkan data, dan melakukan wawancara untuk memperoleh informasi dengan pihak yang terkait atau berhubungan dengan kontribusi Dinas perdagangan dalam meningkatkan daya saing pasar tradisional di Kabupaten Ponorogo. Fokus penelitian yang dilakukan penulis adalah dengan fokus meneliti, mengamati, memilih informan untuk dimintai data informasi dengan melakukan wawancara, mengumpulkan data, menilai kualitas data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan mengenai informasi yang di dapatkan saat melakukan penelitian lapangan.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan peneliti bertempat tepat di Gedung Graha Krida Praja 7th Floor, Jl. Aloon-Aloon Utara, Ponorogo,

¹⁷Lexy J Meloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1998), 86.

Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Alasan Peneliti memilih lokasi ini untuk dilakukan penelitian karena peneliti melihat kontribusi Dinas Perdagangan di Kabupaten Ponorogo yang membantu meningkatkan daya saing pasar tradisional ditengah meledaknya pasar modern sehingga pendapatan dari pasar modern sehingga akhir-akhir ini pendapatan di pasar tradisional sendiri mengalami penurunan yang sangat drastis pula. Dengan demikian Dinas Perdagangan membuat rencana dan menuangkan ide serta kerjanya guna mebangkitkan kembali pasar tradisional ditengah banyaknya pasar modern dan banyaknya jual beli online sehingga lebih memudahkan konsumen dalam hal berbelanja memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pengelolaan potensi pasar dikelola secara langsung oleh Dinas PERDAGKUM (Perdagangan, Koperasi, dan UMKM). Dampak dari pengelolaan pasar sangatlah berpengaruh bagi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi pedagang. Dengan demikian adanya peningkatan potensi bagi masyarakat pasar tradisional dapat memberikan pengaruh lebih baik lagi dan lebih meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat.

d. Data dan Sumber Data

Data merupakan keterangan mengenai kejadian nyata atau fakta yang dirumuskan dalam kelompok lambang tertentu, yang tidak acak dan menunjukkan jumlah, tindakan atau beberapa hal. Data bisa berupa keadaan, gambar, angka matematika, atau simbol-simbol lainnya, yang

dapat digunakan untuk melihat objek, lingkungan atau suatu konsep¹⁸.

Dalam penyusunan skripsi ini memerlukan data-data sebagai berikut :

1. Data tentang peran Dinas perdagangan dalam meningkatkan daya saing pasar tradisional di Kabupaten Ponorogo.
2. Data tentang strategi yang digunakan Dinas Perdagangan dalam menjalankan kebijakannya.
3. Data tentang dampak dari kebijakan Dinas Perdagangan di Kabupaten Ponorogo.

Sumber data merupakan subjek darimana data tersebut diperoleh.¹⁹

Sumber data bisa diartikan sebagai sumber yang diperlukan untuk mendapatkan informasi yang peneliti peroleh dari informan, peran informan disini merupakan pihak yang paham atau mengetahui tentang kontribusi Dinas perdagangan dalam meningkatkan daya saing pasar tradisional di pasar legi Kabupaten Ponorogo menurut perspektif ekonomi islam.

Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber sebagai informan, yang dijadikan sampel dalam penelitian²⁰. Adapun sumber data dalam penelitian ini dari hasil wawancara salah satu pegawai pada Dinas Perdagangan beserta pedagang yang berjualan di pasar legi di Kabupaten Ponorogo. Dan data diperoleh dari bahan-

¹⁸Albi Anggito Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi : CV Jejak.2018), 212.

¹⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2006), 29.

²⁰Jonatan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 20.

bahan bacaan seperti buku, jurnal, hasil penelitian, dan lainnya yang dapat mendukung data dan dapat menjadi acuan teoritik tentang kontribusi Dinas perdagangan dalam meningkatkan daya saing pasar tradisional pasar legi Kabupaten Ponorogo menurut perspektif islam.

e. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Penulis melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi untuk mengetahui bagaimana kontribusi Dinas Perdagangan dalam meningkatkan daya saing pasar tradisional di Kabupaten Ponorogo serta mendatangi pedagang yang ada di pasar legi untuk mendapatkan data yang lebih valid. Dengan demikian, untuk melengkapi data dalam penelitian yang dibutuhkan peneliti adalah keterangan data yang valid.²¹

2) Wawancara

Wawancara pada penelitian ini dilakukan kepada beberapa pihak yaitu pihak yang bekerja pada Dinas perdagangan, kemudia pedagang yang berjualan di pasar tradisional pasar legi. Dari wawancara tersebut dapat diperoleh data mengenai gambaran umum mengenai kontribusi Dinas perdagangan dan apa saja dampak yang terjadi setelah adanya program dari Dinas dalam membantu mempertahankan daya saing pasar.

²¹ Husaini Usman, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta : Bumi Aksara, 2008),52.

f. Analisis Data

Teknik yang digunakan penulis dalam menganalisis data adalah menggunakan model Miles dan Huberman. Model Miles dan Huberman secara teoritis merupakan kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu:

1) Reduksi Data

Reduksi Data yaitu data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.²² Reduksi data dalam penelitian ini yaitu memilah-milah jawaban-jawaban hasil wawancara dari Informan karena tidak semua hasil uraian informan dapat ditarik menjadi suatu jawaban dalam penelitian ini.

2) Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

²² Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 24.

3) Menarik Kesimpulan

Setelah penyajian data, maka langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

g. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data, merupakan konsep yang penting yang diperbaharui dari konsep kesohihan dan keandalan. Analisis data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu deduktif, deduktif merupakan metode dengan cara berfikir yang diawali dengan teori dan ketentuan yang bersifat umum dan dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara khusus. Penulis menggunakan teknik untuk mengecek keabsahan data menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai

pembandingan data tersebut, yaitu meliputi : sumber, metode, penyindik dan teori.²³

G. Sistematika Pembahasan

Laporan hasil penelitian ini akan disusun menjadi tiga bagian utama, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Untuk memudahkan penyusunan skripsi, maka pembahasan dalam laporan penelitian ini, penulis mengelompokkan menjadi V bab. Yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika dan pembahasan skripsi adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini merupakan pola dasar dari keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI, Bab ini berisi tentang landasan teori, yang digunakan sebagai pijakan dan selanjutnya digunakan untuk menganalisis data laporan penelitian ini. Isi dari bab ini yaitu pengertian peran pemerintah, strategi pemerintah dalam peningkatan daya saing pedagang, dampak peningkatan daya saing ditinjau menurut perspektif ekonomi islam.

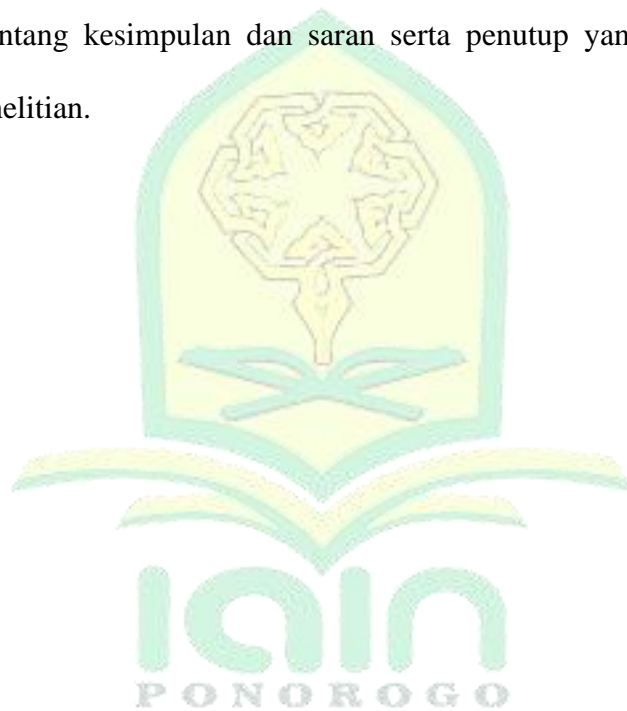
BAB III METODE PENELITIAN, Bab ini membahas mengenai masalah yang dikaji penulis dalam penelitian lapangan (*field research*). Bab ini berisi tentang deskripsi umum tentang Pasar legi, peran Pemerintah dalam pelaksanaan program kerja, strategi yang digunakan

²³Jonatan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006), 239.

dalam pelaksanaan program kerja, serta dampak dari pelaksanaan program kerja ditinjau menurut perspektif ekonomi islam.

BAB IV HASIL PENELITIAN, Bab ini berisikan tentang gagasan-gagasan penulis terkait dengan temuan yang diperoleh dari hasil penelitian terhadap teori-teori yang ada yang akan digunakan penulis untuk menganalisis data yang telah terkumpul.

BAB V PENUTUP, merupakan bagian terakhir dari pembahasan yang berisi tentang kesimpulan dan saran serta penutup yang terkait dengan hasil penelitian.



BAB II

PERAN PEMERINTAH DALAM PENINGKATAN DAYA SAING PEDAGANG DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

A. Peran Pemerintah Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pada dasarnya peranan pemerintah dalam perekonomian yang islami, memiliki dasar rasionalitas yang kokoh. Dalam pandangan Islam, peran pemerintah didasari oleh beberapa argumentasi, yaitu:

- a. Derivasi dari konsep kekhalifahan.
- b. Konsekuensi adanya kewajiban-kewajiban kolektif (*fard al-kifayah*).
- c. Adanya kegagalan pasar dalam merealisasikan *falah*.

Pemerintah adalah pemegang amanah Allah untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan (*al-adl wal ihsan*) serta tata kehidupan yang baik (*hayyah thayyibah*) bagi seluruh umat. Jadi, pemerintah adalah agen dari Tuhan atau khalifatullah, untuk merealisasikan *falah*. Sebagai pemegang amanah Tuhan, eksistensi dan peran pemerintah ini memiliki landasan yang kokoh dalam Al-Qur'an dan sunnah, baik secara eksplisit maupun implisit. Kehidupan Rasulullah dan Khulafaurrasyidin merupakan teladan yang amat baik bagi eksistensi pemerintah. Dasar dalam menjalankan amanah tersebut pemerintah akan menjunjung tinggi prinsip musyawarah (*syura*) sebagai salah satu mekanisme pengambilan keputusan yang penting dalam Islam. Dengan

demikian pemerintah pada dasarnya sekaligus memegang amanah dari masyarakat.¹

Pemerintah dapat memiliki peranan penting dalam menjalankan *fard al-kifayah* ini karena memungkinkan masyarakat gagal untuk menjalankannya atau tidak dapat melaksanakannya dengan baik. Kemungkinan kegagalan masyarakat dalam menjalankan *fard al-kifayah* ini disebabkan beberapa hal, yaitu:

- a. Asimetri dan kekurangan informasi.
- b. Pelanggaran moral.
- c. Kekurangan sumber daya atau kesulitan teknis.

Masyarakat kemungkinan tidak memiliki informasi yang memadai tentang adanya suatu kewajiban publik, sehingga mereka tidak melaksanakannya. Dalam kenyataan, pemerintah biasanya memiliki informasi yang lebih lengkap dan akurat dibandingkan masyarakat, karena pemerintah memiliki sumber daya yang lebih baik dalam mencari dan mengolah informasi. Seandainya informasi tentang kewajiban publik ini diketahui masyarakat, maka belum tentu mereka akan dapat menjalankan karena alasan rendahnya kesadaran terhadap *fard al-kifayah* ini. Jika kesadaran masyarakat terhadap kewajiban publik rendah, maka mereka tidak akan melakukannya, meskipun mengetahui adanya kewajiban ini. Bahkan, masyarakat kemungkinan juga akan mengabaikan atau setidaknya tidak dapat melaksanakan kewajiban publik dengan baik karena ketiadaan

¹ Munrokim Misanam, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 446.

sumber daya atau keahlian yang dibutuhkan. Jika salah satu atau ketiga hal ini terjadi, maka pemerintah harus mengambil alih kewajiban-kewajiban publik tersebut.

Kegagalan pasar juga merupakan latar belakang perlunya pemerintah untuk berperan dalam perekonomian. Pasar gagal dalam menyelesaikan beberapa permasalahan ekonomi karena dua hal yaitu: yang pertama adanya ketidaksempurnaan mekanisme kerja pasar, dan yang kedua tidak berjalannya mekanisme kerja pasar dengan efisien. Pasar bekerja dengan mekanisme permintaan dan penawaran dimana mensyaratkan suatu komoditas yang dapat diperdagangkan. Komoditas seperti ini harus memiliki suatu harga, sedangkan untuk memiliki harga komoditas seperti ini otomatis harus bias diukur. Dalam kenyataan, terdapat banyak kebutuhan masyarakat yang tidak bias diukur, karenanya juga tidak dapat memiliki harga dan tidak dapat diperdagangkan, sehingga tidak dapat disediakan oleh pasar. Beberapa *non-marketable goods and services* ini diantara lain penyediaan barang publik, penanganan eksternalitas, penegakan keadilan, pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan, pertahanan, dan lain-lain. Karena barang dan jasa tersebut *non-tredable*, maka tidak intensif material bagi individu untuk menyediakannya sehingga pemerintah atau masyarakatlah yang harus mengambil alih.

Selain itu, dalam realitas mekanisme kerja pasar juga tidak dapat beroperasi secara optimal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat pasar yang Islami. Mekanisme pasar dapat berjalan dengan efisien dan

menghasilkan harga yang adil (*thaman al-adl*). Untuk menghasilkan harga yang adil ini, maka harus terpenuhinya syarat teknis dan syarat moral sekaligus. Secara teknis, mekanisme kerja pasar yang efisien dapat berlangsung apabila terdapat informasi yang sama diantara pelaku pasar, tidak adanya hambatan untuk masuk dan keluar dari pasar, homogenitas komoditas, serta jumlah penjual yang banyak. Dengan kata lain, pasar yang bersaing sempurna memiliki peluang untuk menghasilkan harga yang adil. Secara moral, mekanisme kerja pasar yang efisien menuntut adanya sikap kejujuran, keterbukaan, sportivitas, dan keadilan. Moralitas akan menuntut persaingan di pasar menjadi kompetisi yang indah dalam rangka mewujudkan kebaikan (*fastabiqu al-khairat*), sehingga memberikan masalah bagi masyarakat luas.²

Dalam kenyataan sehari-hari, syarat-syarat teknis tersebut sering kali tidak ada atau ada, tetapi tidak memadai sehingga memerlukan upaya pemerintah untuk mewujudkannya. Realitas menunjukkan, bahwa asimetri informasi, hambatan perdagangan, monopoli, dan heterogenitas sering terjadi. Bahkan, hal-hal tersebut dapat terjadi secara alamiah, sehingga terpenuhinya syarat-syarat teknis tersebut sering dianggap sebagai ketidakmungkinan. Moralitas sering kali menjadi hambatan yang serius untuk mewujudkan pasar yang efisien. Pelaku pasar terkadang melanggar nilai-nilai moralitas untuk memenangkan persaingan. Pelaku pasar juga dapat menggunakan kemampuan/keunggulan bersaingnya untuk

² Ibid., 449.

kepentingan pribadi yang kemungkinan tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat. Jika tidak terdapat intervensi pemerintah, secara alamiah pasar yang bersaing akan menuju pada monopoli. Persaingan akan memberikan ruang kepada pelaku yang kuat untuk semakin mendominasi pasar, dan mendorong keluar pelaku yang lemah. Ketika kekuatan dominan, pasar ini telah menjadi *monopolist*, maka terbuka lebar baginya mencari rente (*monopolistic rente*) yang merugikan masyarakat.

Tidak ada satu Negara pun di dunia ini yang tidak mengikutsertakan peranan pemerintah dalam sistem perekonomiannya. Banyaknya perkembangan dan kemajuan akibat semakin majunya teknologi dan banyaknya penemuan-penemuan baru serta semakin terbukanya perekonomian antar negara, menyebabkan begitu banyak kepentingan yang saling terkait dan berbenturan. Hal ini menyebabkan peran pemerintah semakin dibutuhkan dalam mengatur jalannya sistem perekonomian, karena tidak sepenuhnya semua bidang perekonomian itu dapat ditangani oleh swasta. Dengan demikian dalam sistem perekonomian modern, peranan pemerintah dapat dibagi menjadi tiga bagian,³ yaitu :

1. Peranan Alokasi Peranan alokasi oleh pemerintah sangat dibutuhkan terutama dalam hal penyediaan barang-barang yang tidak dapat disediakan oleh swasta, yaitu barang-barang yang bersifat umum atau disebut juga barang publik. Karena dalam sistem perekonomian suatu negara, tidak semua barang dapat disediakan oleh swasta dan dapat

³ Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah, dan dasar Kebijakan* (Jakarta: LPFE UI, 1987), 87.

diperoleh melalui sistem pasar. Maka pemerintah harus bisa menyediakan barang publik tersebut. Sedangkan barang yang diperoleh melalui sistem pasar, yaitu melalui transaksi antara penjual dan pembeli disebut barang swasta. Tidak dapat tersedianya barang publik oleh sistem atau mekanisme pasar ini disebut dengan kegagalan pasar (*market failure*). Contoh dari barang atau jasa yang tidak dapat disediakan oleh sistem pasar, misalnya: udara bersih, jalan umum, jembatan, dan lain sebagainya.

2. Peranan Distribusi Peranan distribusi ini merupakan peranan pemerintah sebagai alat distribusi pendapatan dan kekayaan. Tidak mudah dalam menjalankan peranan ini, karena distribusi ini berkaitan erat dengan masalah keadilan. Dalam ilmu ekonomi, masalah keadilan dan distribusi pendapatan merupakan masalah yang rumit, karena seringkali berbenturan dengan masalah efisiensi, yang mungkin dianggap tidak adil oleh masyarakat. Perubahan ekonomi dapat dikatakan efisiensi apabila kebijaksanaan yang diterapkan untuk memperbaiki kondisi suatu golongan tidak memperburuk kondisi golongan yang lain. Dan hal inilah yang merupakan trade off bagi pemerintah karena sulit untuk membuat suatu kebijaksanaan yang tidak berdampak sama sekali, baik positif maupun negatif bagi berbagai pihak. Pemerintah dapat merubah distribusi pendapatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Distribusi pendapatan tergantung dari pemilikan faktor-faktor produksi, permintaan dan

penawaran. Dari sisi etika maka pendistribusian kembali pendapatan dari pihak kaya ke pihak miskin sebagai suatu mekanisme trickle-down adalah sangat baik. Pendistribusian ini akan menjadi benar hanya jika mekanismenya diserahkan pada pemerintah bukan kepada pihak orang kaya.

3. Peranan Stabilisasi Selain peranan alokasi dan distribusi, pemerintah mempunyai peranan utama sebagai alat stabilisasi perekonomian. Peranan ini berhubungan dengan hal-hal yang saling berkaitan dan peristiwa-peristiwa atau kondisi yang tidak terduga sebelumnya dan saling berkaitan satu sama lain. Sehingga kebijaksanaan yang diambil terkadang dapat bertentangan satu sama lain. Perekonomian yang sepenuhnya diserahkan kepada sektor swasta akan sangat peka terhadap guncangan keadaan yang akan menimbulkan pengangguran dan inflasi. Ketika suatu barang turun daya belinya maka yang terjadi adalah mengurangi produksi. Jika hal ini dibiarkan akan mengakibatkan pengangguran besar-besaran. Pengangguran akan mengganggu stabilitas politik maupun ekonomi. Maka peranan stabilisasi pemerintah dibutuhkan jika terjadi gangguan dalam stabilitas perekonomian, seperti: terjadi deflasi, inflasi, penurunan permintaan atau penawaran suatu barang.

Peran pemerintah yang semakin besar dalam perekonomian tidak dapat dilepaskan dari kegagalan pasar (*market failure*). Kegagalan pasar inilah yang pada mulanya menjadi latar belakang dirasa perlunya campur

tangan pemerintah. Namun kegagalan pasar hanyalah salah satu sebab mengapa pemerintah harus turun tangan dalam perekonomian agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal. Dalam ekonomi pasar yang dikendalikan oleh pemerintahan yang dipilih secara demokratis, hanya ada dua alasan bagi pemerintah untuk masuk ke dalam aktivitas masyarakat, yaitu: social equity dan kegagalan pasar.⁴

Permasalahan sekarang adalah bagaimana menyelaraskan seluruh kebijaksanaan yang akan diterapkan jika terjadi suatu masalah, tanpa bertentangan dengan kebijaksanaan yang lain dan tanpa menimbulkan masalah baru. Baik itu kebijaksanaan dalam rangka peranan pemerintah sebagai alat untuk mengalokasikan sumber-sumber ekonomi agar efisien, distribusi pendapatan agar merata dan adil, serta stabilitas ekonomi. Yang dilakukan Smith adalah mengajukan sebuah kebijaksanaan ekonomi yang praktis, yaitu bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi sambil tetap menjamin kebebasan setiap pelaku ekonomi. Karena itu pada dasarnya ia tidak menentang campur tangan pemerintah.⁵

Paling tidak, ada dua tugas utama yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, memberikan perlindungan kepada pelaku usaha kecil/ tradisional dari ancaman ketersingkirkan akibat ketidakmampuan bersaing, misalnya melalui pengaturan zonasi, waktu buka, kewajiban melakukan kemitraan, dan sebagainya. Hal inilah yang saat ini dicoba untuk diadopsi oleh pemerintah melalui Rencana Peraturan Presiden tentang Pembinaan Usaha

⁴ Mulyadi, *Ekonomi Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 67.

⁵ Bilson Simamora, *Panduan Riset perilaku Konsumen* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 6.

Pasar Modern dan Usaha Toko Modern. Kedua, melakukan pemberdayaan usaha kecil/tradisional untuk memperkuat daya saing mereka sehingga mereka mampu mengakomodasi tuntutan masyarakat terhadap aspek-aspek yang lebih berkaitan dengan psikologi konsumen, seperti kenyamanan, rasa aman, dan sebagainya.⁶

Kesejahteraan masyarakat haruslah diwujudkan oleh Pemerintah Daerah dengan jalan mengelola segala potensi yang dimiliki, melalui sebuah manajemen dan penerapan konsep pengembangan yang strategis, salah satunya adalah dalam bidang perekonomian, terutama pada pasar tradisional yang merupakan sumber mata pencaharian bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

Maka dari itu, peran Pemerintah Daerah sebagai lembaga organisasi pemerintah merupakan fungsi dalam menunjang program meningkatkan daya saing pasar tradisional di Kabupaten Ponorogo dan untuk melaksanakan peranannya tersebut, pemerintah daerah harus melaksanakan fungsinya yang merupakan tugas atau pekerjaan yang harus dilaksanakan. Pemerintah daerah diharapkan akan semakin mampu bekerja secara efektif dan efisien dalam melayani dan merespons segala tuntutan masyarakat, dan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.⁷

Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Ponorogo dalam hal ini sebagai penanggung jawab pokok pengembangan dan pengelola seluruh

⁶ Adri Poesoro, "Pasar Tradisional di Era Persaingan Global", *Buletin Lembaga Penelitian SMERU*, Volume 1 Nomor 2, (2007), 22.

⁷ Budi Winarno, *Kebijakan Publik, Teori dan Proses* (Yogyakarta: Media Presindo, 2002), 87.

potensi pasar tradisional yang ada di sana, yang harus merumuskan suatu strategi pengelolaan dan pengembangan yang baik, sehingga hal itu bisa mendatangkan suatu dampak yang sangat positif terhadap kehidupan masyarakat dan pastinya dapat mendatangkan serta meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor ekonomi.

B. Strategi Pemerintah Dalam Peningkatan Daya Saing Pedagang

Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam kamus Bahasa Indonesia (1995), daya saing adalah kemampuan komoditi untuk memasuki pasar luar negeri dan kemampuan untuk bertahan didalam pasar tersebut. Rendahnya daya saing pasar disebabkan iklim usaha yang kurang kondusif, biaya ekonomi tinggi seperti banyaknya pungutan atau retribusi yang membebani industri. Juga disebabkan oleh ketergantungan terhadap produk impor yang semakin tinggi.

Daya saing diidentikkan dengan produktivitas dimana tingkat output yang dihasilkan untuk setiap unit input yang digunakan. Peningkatan produktivitas meliputi peningkatan jumlah input fisik (modal dan tenaga kerja), peningkatan kualitas input yang digunakan dan peningkatan teknologi (total faktor produktivitas). Pendekatan yang sering digunakan untuk mengukur daya saing suatu komoditi dilihat dari dua indikator yaitu keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif.⁸

⁸ Abdullah Pitter, *Daya Saing Daerah: Konsep Pengukuran di Indonesia* (Yogyakarta: BPFE, 2002), 47.

1. Konsep Keunggulan Komparatif

Konsep daya saing berpijak dari konsep keunggulan komparatif yang diperkenalkan oleh Ricardo sekitar abad ke-18 (1823) yang selanjutnya dikenal dengan model Ricardian Ricardo atau Hukum Keunggulan Komparatif (The Law of Comparative Advantage). Ricardo menyatakan bahwa meskipun sebuah negara kurang efisien dibandingkan (memiliki kerugian absolut terhadap) negara lain dalam memproduksi kedua komoditas, namun masih tetap terdapat dasar untuk melakukan perdagangan yang menguntungkan kedua belah pihak. Negara pertama harus melakukan spesialisasi dalam memproduksi dan mengekspor komoditas yang memiliki kerugian absolut lebih kecil (memiliki keunggulan komparatif) dan mengimpor komoditas yang memiliki kerugian absolut lebih besar atau memiliki kerugian komparatif.

Teori keunggulan komparatif Ricardo ini kemudian disempurnakan oleh Haberler (1936), yang mengemukakan bahwa konsep keunggulan komparatif yang berdasarkan pada Teori Biaya Imbangan (Opportunity Cost Theory). Haberler menyatakan bahwa biaya dari satu komoditas adalah jumlah komoditas terbaik yang harus dikorbankan untuk memperoleh sumber daya-sumber daya yang cukup untuk memproduksi satu unit tambahan komoditas pertama. Teori keunggulan komparatif yang lebih modern adalah seperti yang dikemukakan oleh Heckscher Ohlin (1933) dalam Lindert dan

Kindelberger (1993), yang menekankan pada perbedaan bawaan faktor produksi antar negara sebagai determinasi perdagangan yang paling penting. Teori H-O menganggap bahwa setiap negara akan mengekspor komoditas yang relatif intensif menggunakan faktor produksi yang melimpah, karena biayanya akan cenderung murah, serta mengimpor komoditas yang faktor produksinya relatif langka dan mahal.

Keunggulan komparatif bersifat dinamis, sebab suatu negara yang memiliki keunggulan komparatif di sektor tertentu secara potensial harus mampu mempertahankan dan bersaing dengan negara lain. Keunggulan komparatif berubah karena faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang dapat merubah keunggulan komparatif adalah 1). Ekonomi dunia; 2). Lingkungan domestik; dan 3). Teknologi.

Menurut hukum keunggulan komparatif tersebut meskipun suatu negara mengalami kerugian atau ketidakunggulan absolut untuk memproduksi dua komoditi jika dibandingkan dengan negara lain, namun perdagangan yang saling menguntungkan masih dapat berlangsung. Hal ini dapat terjadi jika salah satu negara berspesialisasi dalam memproduksi dan mengekspor komoditi yang memiliki kerugian absolut lebih kecil (komoditi yang memiliki keunggulan komparatif) dan mengimpor komoditi yang memiliki kerugian absolut lebih besar atau yang memiliki kerugian komparatif.

2. Konsep Keunggulan Kompetitif

Keunggulan kompetitif (Competitive Advantage) merupakan alat untuk mengukur daya saing suatu aktivitas berdasarkan pada kondisi perekonomian aktual. Adanya konsep keunggulan kompetitif didasarkan pada asumsi bahwa perekonomian yang tidak mengalami distorsi sama sekali sulit ditemukan di dunia nyata, dan keunggulan komparatif suatu aktivitas ekonomi dari sudut pandang atau individu yang berkepentingan langsung. Oleh karena itu keunggulan komparatif tidak dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur keuntungan suatu aktivitas ekonomi dari sudut pandang badan atau orang-orang yang berkepentingan langsung dalam suatu proyek. Konsep yang lebih cocok untuk mengukur kelayakan secara finansial adalah keunggulan kompetitif.⁹

Selanjutnya dikatakan suatu negara atau daerah yang memiliki keunggulan komparatif atau kompetitif menunjukkan keunggulan baik dalam potensi alam, penguasaan teknologi, maupun kemampuan manajerial dalam kegiatan yang bersangkutan. Maka komoditi yang memiliki keunggulan kompetitif dikatakan juga memiliki efisiensi secara finansial. Keunggulan perdagangan antar negara didalam perdagangan internasional sebenarnya tidak ada. Pada kenyataannya yang ada adalah persaingan antara kelompok-kelompok kecil industri di satu negara dengan negara lainnya, bahkan antar kelompok industri

⁹ Khairul Muluk, *Desentralisasi Pemerintah dan Daerah* (Malang: Bayumedia Publishing, 2009), 36.

yang ada dalam satu negara. Dalam persaingan global saat ini, suatu bangsa atau negara yang memiliki *competitive advantage of nation* dapat bersaing di pasar internasional bila memiliki empat faktor penentu dan dua faktor pendukung. Empat faktor utama yang menentukan daya saing suatu komoditi adalah *factor condition, demand condition, related and supporting industry, serta firm strategy, structure, and rivalry*. Ada dua faktor yang mempengaruhi interaksi antara ke empat faktor tersebut yaitu *chance event* dan *government*. Secara bersama-sama faktor-faktor ini membentuk sistem dalam peningkatan keunggulan daya saing yang disebut *Porters Diamond Theory*.¹⁰

a. Kondisi Faktor (Factor Condition)

Sumber daya yang dimiliki suatu bangsa merupakan suatu faktor produksi yang sangat penting untuk bersaing. Ada lima kelompok dalam faktor sumber daya, yaitu :

- 1) Sumber daya manusia, meliputi jumlah tenaga kerja yang tersedia, kemampuan manajerial dan keterampilan yang dimiliki, etika kerja dan tingkat upah yang berlaku. Dimana semuanya ini sangat mempengaruhi daya saing nasional.
- 2) Sumber daya modal, terdiri dari jumlah dan biaya yang tersedia, jenis pembiayaan atau sumber modal, aksesibilitas

¹⁰ Suryana, *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan* (Jakarta: Salemba Empat, 2000), 24.

terhadap pembiayaan, serta kondisi lembaga pembiayaan dan perbankan.

- 3) Sumber daya alam atau fisik, meliputi biaya, aksesibilitas, mutu dan ukuran.
- 4) Sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), merupakan sumberdaya yang terdiri dari ketersediaan pengetahuan tentang pasar, pengetahuan teknis, pengetahuan ilmiah yang menunjang dalam memproduksi barang dan jasa.
- 5) Sumber daya infrastruktur yang terdiri dari ketersediaan jenis, mutu, dan biaya penggunaan infrastruktur yang mempengaruhi daya saing, seperti halnya sistem transportasi, komunikasi, pos dan giro, sistem pembayaran dan transfer dana, air bersih, energi listrik, dan lain-lain. Semakin tinggi kualitas faktor input ini, maka semakin besar peluang industri untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas.

b. Kondisi Permintaan (Demand Condition)

Kondisi permintaan merupakan sifat dari permintaan pasar untuk barang dan jasa industri. Kondisi permintaan ini sangat mempengaruhi daya saing terutama mutu permintaan. Mutu permintaan merupakan sarana pembelajaran bagi perusahaan-perusahaan untuk bersaing secara global. Mutu permintaan juga memberikan tantangan bagi perusahaan untuk meningkatkan daya saingnya dengan memberikan tanggapan

terhadap persaingan yang terjadi. Menurut Porter, kondisi permintaan dalam diamond model dikaitkan dengan sophisticated and demanding local customer. Artinya semakin maju suatu masyarakat dan semakin demanding pelanggan dalam negeri, maka industri akan selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas produk atau melakukan inovasi guna memenuhi permintaan pelanggan lokal yang tinggi. Dalam hal ini kondisi permintaan tidak hanya berasal dari lokal tetapi juga dari luar negeri karena adanya globalisasi.

c. Industri Terkait dan Industri Pendukung (Related and Supporting Industry)

Keberadaan industri terkait dan pendukung akan mempengaruhi daya saing dalam hal industri hulu yang mampu memasok input bagi industri utama dengan harga yang lebih murah, mutu yang lebih baik, pelayanan yang cepat, pengiriman tepat waktu dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan industri. Begitu pula dengan industri hilir yang menggunakan produk industri utama sebagai bahan bakunya. Jika industri hilirnya berdaya saing global, maka dapat menarik industri hulunya menjadi ikut berdaya saing pula. Adapun manfaat industri pendukung dan terkait akan meningkatkan efisiensi dan sinergi dalam suatu industri. Sinergi dan efisiensi dapat tercipta terutama dalam transaction cost, sharing teknologi, informasi, ataupun skills

(keahlian dan keterampilan) tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh industri atau perusahaan lainnya. Selain itu dengan adanya industri pendukung dan terkait maka akan meningkatkan produktivitas yang dapat menciptakan daya saing.

d. Persaingan, Struktur dan Strategi Perusahaan (Firm Strategy, Structure, and Rivalry)

Adanya tingkat persaingan bagi perusahaan akan mendorong kompetisi dan inovasi. Persaingan dalam negeri mendorong perusahaan untuk mengembangkan produk baru, memperbaiki produk yang telah ada, menurunkan harga dan biaya, mengembangkan teknologi baru, dan memperbaiki mutu serta pelayanan. Dalam hal ini, strategi perusahaan dibutuhkan untuk memotivasi perusahaan atau industri untuk selalu meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan dan selalu mencari inovasi baru.

Struktur perusahaan atau industri dapat menentukan daya saing dengan melakukan perbaikan dan inovasi. Dalam situasi persaingan, hal ini juga akan berpengaruh pada strategi yang dijalankan perusahaan atau industri. Pada akhirnya persaingan di dalam negeri yang kuat akan mendorong perusahaan untuk mencari pasar internasional.

e. Peran Pemerintah (Government)

Peran pemerintah akan berpengaruh terhadap faktor-faktor yang menentukan tingkat daya saing. Pemerintah bertindak sebagai

fasilitator agar perusahaan dan industri semakin meningkatkan daya saingnya. Pemerintah dapat mempengaruhi daya saing global melalui regulasi-regulasi dan kebijakan yang memperlemah atau memperkuat faktor penentu daya saing tersebut. Pemerintah juga dapat memfasilitasi lingkungan industri yang mampu memperbaiki kondisi faktor daya saing sehingga dapat berdaya guna secara efisien dan aktif.

f. Peran Kesempatan (Chance Factor)

Peran kesempatan berada di luar kendali perusahaan maupun pemerintah untuk mempengaruhi daya saing. Hal-hal seperti keberuntungan merupakan peran kesempatan, seperti penemuan baru yang murni, biaya perusahaan yang konstan akibat perubahan harga minyak atau depresiasi mata uang. Selain itu dapat juga terjadi karena peningkatan permintaan produk industri yang lebih besar dari pasokannya atau kondisi politik yang menguntungkan daya saing.

Suatu komoditas dapat mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif sekaligus, yang berarti komoditas tersebut menguntungkan untuk diproduksi atau diusahakan dan dapat bersaing di pasar internasional. Akan tetapi, apabila komoditas yang diproduksi di suatu negara hanya mempunyai keunggulan komparatif namun tidak memiliki keunggulan kompetitif, maka di negara tersebut dapat diasumsikan terjadi distorsi pasar atau terdapat hambatan-hambatan

yang mengganggu kegiatan produksi sehingga merugikan produsen seperti prosedur administrasi, perpajakan dan lain-lain. Untuk itu pemerintah perlu melakukan deregulasi yang dapat menghilangkan hambatan (distorsi pasar tersebut).

Akan tetapi keunggulan kompetitif suatu bangsa bergantung pada kapasitas dan kemampuan industri untuk melakukan inovasi. Daya saing merefleksikan kemampuan negara mendorong peningkatan nilai tambah perusahaan secara berkelanjutan melalui pengembangan inovasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian akan terjadi pergeseran daya saing ke perspektif daya saing bangsa melalui peran pemerintah dalam pengembangan iptek.

Daya saing mencakup aspek yang lebih luas dari sekedar produktivitas atau efisiensi pada level mikro. Hal ini memungkinkan kita lebih memilih mendefinisikan daya saing sebagai “kemampuan suatu perekonomian” daripada “kemampuan sektor swasta atau perusahaan”. Pelaku ekonomi (economic agent) bukan hanya perusahaan, akan tetapi juga rumah tangga, pemerintah, dan lain-lain. Semuanya terpadu dalam suatu sistem ekonomi yang sinergis. Tanpa memungkiri peran besar sektor swasta perusahaan dalam perekonomian. Hal ini diupayakan dalam rangka menjaga luasnya cakupan konsep daya saing.¹¹

¹¹ Irham Fahmi, *Manajemen kinerja: Teori dan Aplikasi* (Bandung: Alfabeta, 2011), 56.

Selain itu daya saing dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk mempertahankan pangsa pasar. Kemampuan ini sangat ditentukan oleh faktor suplai yang tepat waktu dan harga yang kompetitif. Secara berjenjang, suplai tepat waktu dan harga yang kompetitif dipengaruhi oleh dua faktor penting lainnya, yaitu fleksibilitas (kemampuan untuk melakukan adaptasi terhadap keinginan konsumen) dan manajemen differensiasi produk. Begitu pula halnya dengan fleksibilitas dan differensiasi produk dapat dicapai sepanjang adanya kemampuan untuk melakukan inovasi dan adanya efektivitas dalam sistem pemasaran.

Daya saing mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan produktivitas perusahaan dan memperluas akses pasar. Hal ini akan bermuara kepada peningkatan omzet penjualan dan profitabilitas perusahaan. Selanjutnya menurut Kurnia (2000), kemampuan bersaing para pedagang tradisional sesungguhnya unik. Para pedagang tradisional bertindak sesuai dengan filosofi “small is beautiful”. Tentu, hal ini disebabkan oleh modal mereka yang pas-pasan, sehingga mereka hanya berdagang sesuai dengan kemampuan mereka, yakni dalam skala kecil. Banyak di antara mereka yang membeli barang dagangannya secara harian. Tetapi, dengan begitu, produk mereka jadi lebih segar, dan kualitasnya bisa menyamai pasar

swalayan moderen. Karena skala yang kecil, pedagang tradisional juga dinamis, dan mobilitas mereka sangat tinggi.¹²

Meningkatkan daya saing pasar adalah segala upaya pemerintah dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik tempat agar dapat bersaing dengan pasar modern. Dalam meningkatkan daya saing pada pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya, pemerintah daerah berkewajiban melakukannya dalam berbagai aspek :

- a. Pembinaan terhadap pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya.
- b. Pemberian subsidi kepada pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya.
- c. Peningkatan kualitas dan sarana pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya.
- d. Pengembangan pasar tradisional dan pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya.

¹² Suparmoko, *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, Edisi 1 (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2002), 45.

- e. Fasilitas pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang.
- f. Mengarahkan dana yang berasal dari pemerintah kepada pemerintah daerah dalam rangka membangun pasar induk dan/atau pasar penunjang.

Tujuan dan hasil akhir dari meningkatnya daya saing suatu perekonomian tak lain adalah meningkatnya tingkat kesejahteraan penduduk di dalam perekonomian tersebut. Kesejahteraan (*level of living*) adalah konsep yang sangat luas pasti tidak hanya tergambarkan dalam sebuah besaran variabel seperti pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi hanya satu aspek dari pembangunan ekonomi dalam rangka peningkatan standar kehidupan masyarakat

C. Peranan Pemerintah terhadap Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam konsep Islam, pemerintah bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan kehidupan masyarakatnya di berbagai bidang, terutama di bidang ekonomi yang merupakan tulang punggung kehidupan. Campur tangan negara yang sebelumnya pernah menjadi perdebatan antara kapitalis dan sosialis, dalam Islam merupakan suatu bentuk tanggung jawab negara untuk menjamin kemaslahatan rakyatnya. Bahkan, kini campur tangan negara (pemerintah) atau yang biasa kita kenal sebagai

kebijakan pemerintah tidak bisa dihindarkan oleh negara manapun termasuk yang menganut sistem kapitalis ataupun pasar bebas.¹³

Pengertian ekonomi Islam sebagai ekonomi yang dibangun atas nilai-nilai universal Islam. Nilai-nilai yang dimaksud antara lain; Tauhid (keesaan), *'Adl* (keadilan), *Khilafah* (pemerintahan), *nubuwwah* (kenabian), dan *ma'ad* (return). Secara singkat korelasi prinsip-prinsip itu terdapat sistem pertanggungjawaban bagi setiap tindakan ekonomi. Pada akhirnya, dalam skala makro prinsip pertanggungjawaban tersebut mendorong terwujudnya keadilan (*adl*) ekonomi dalam suatu masyarakat. Namun, untuk dapat merealisasikan keadilan tersebut diperlukan adanya intervensi khilafah (pemerintah) sebagai regulator.

Salah satu kepentingan umat yang wajib dilaksanakan oleh negara adalah mengatur ekonomi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kewajiban negara atas rakyatnya yaitu melayani dan mengurus urusan umat. Hal ini ditegaskan Nabi SAW dalam hadist yang berbunyi: “Seorang imam (khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan dia akan diminta pertanggungjawabannya terhadap rakyatnya”. (HR Muslim). Upaya penanggulangan kemiskinan yang paling strategis dapat dirumuskan dalam satu kalimat yaitu “Berikan peluang kepada keluarga miskin dan komunitasnya untuk mengatasi masalah mereka secara mandiri”. Hal ini menyatakan bahwa pemerintah harus mereposisi peran mereka, dari agen pemberdayaan menjadi fasilitator pemberdayaan.

81. ¹³ Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017),

Salah satu tokoh pemikiran ekonomi Islam, Abdul Mannan berpendapat tentang pengertian ekonomi Islam bahwa “*Islamic economics is a social science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam*”. Menurutnya, yang membedakan sistem ekonomi Islam dari sistem sosio-ekonomi lain adalah sifat motivasional yang mempengaruhi pola, struktur, arah, serta komposisi produksi, distribusi, dan konsumsi. Dengan demikian, tugas utama ekonomi Islam yaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi asal-usul permintaan dan penawaran untuk mengubah keduanya ke arah distribusi yang lebih adil. Oleh karena itu, pemerintah mengoptimalkan sistem ekonomi Islam yang ada sebagai pedoman dalam mengambil sebuah kebijakan yang adil.¹⁴

Peranan pemerintah sangat penting untuk lebih menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna. Rasulullah SAW sendiri telah menjalankan fungsi sebagai pengawas pasar atau *al-Hisbah*, yang kemudian banyak dijadikan acuan untuk peran negara terhadap pasar. Rasulullah SAW sering melakukan inspeksi ke pasar untuk mengecek harga dan mekanisme pasar.¹⁵

Seringkali dalam inspeksinya, beliau banyak menemukan praktik bisnis yang tidak jujur sehingga beliau menegurnya. Rasulullah SAW juga banyak memberikan pendapat, perintah maupun larangan demi terciptanya

¹⁴ Rozalinda, *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasi pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015),97.

¹⁵ Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 56.

pasar yang Islami. Semua ini mengindikasikan dengan jelas bahwa *al-Hisbah* telah ada sejak masa Rasulullah SAW, meskipun nama *al-Hisbah* baru datang di masa kemudian. Sementara, tujuan *al-Hisbah* menurut Ibnu Taimiyah adalah untuk memerintahkan apa yang disebut sebagai kebaikan dan mencegah apa yang secara umum disebut sebagai keburukan di dalam wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah untuk mengaturnya, mengadili dalam wilayah umum khusus lainnya, yang tak bisa dijangkau oleh institusi biasa.¹⁶

Jadi, *al-Hisbah* adalah semacam polisi khusus ekonomi. Bahkan lembaga ini merupakan suatu agen independen sehingga terlepas dari kepentingan kelompok tertentu atau pemerintah itu sendiri. Namun, dengan melihat fungsi *al-Hisbah* yang luas dan strategis ini, adanya suatu agen independen, tampak *al-Hisbah* akan melekat pada fungsi pemerintah secara keseluruhan, di mana dalam teknis operasionalnya akan dijalankan oleh kementerian, departemen, dinas atau lembaga lain yang terkait.

Dalam pandangan Islam, peran pemerintah didasari oleh beberapa argumentasi, yaitu:

- a. Derivasi dari konsep kekhalifahan.
- b. Konsekuensi adanya kewajiban-kewajiban kolektif.
- c. Adanya kegagalan pasar dalam merealisasikan falah.

Adapun yang mungkin menjadi kegagalan masyarakat dalam menjalankan fardh al-kifayah ini disebabkan beberapa hal, yaitu:

¹⁶ Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), 98.

- a. Asimetri dan kekurangan informasi.
- b. Pelanggaran moral.
- c. Kekurangan sumber daya atau kesulitan teknis.¹⁷

Kegagalan pasar juga merupakan latar belakang perlunya pemerintah untuk berperan dalam perekonomian. Kegagalan pasar adalah ketidakmampuan dari suatu perekonomian pasar untuk berfungsi secara efisien dan menimbulkan keteguhan dan pertumbuhan ekonomi. Kegagalan pasar atau market failure terjadi ketika mekanisme harga gagal untuk memperhitungkan semua biaya dan manfaat yang diperlukan, baik untuk menyediakan dan mengkonsumsinya. Pasar akan gagal dengan tidak menyediakan jumlah yang optimal secara baik dari aspek sosial.

Pemerintah memiliki tugas penting dalam mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan. Sebagaimana telah diketahui, tujuan ekonomi Islam adalah mencapai falah yang direalisasikan melalui optimasi mashlahah. Oleh karena itu, sebagai pengemban amanah dari Allah SWT dan masyarakat, maka secara umum tujuan peran pemerintah adalah menciptakan kemashlahatan bagi seluruh masyarakat. Menurut al-Mawardi, tugas dari pemerintah adalah untuk melanjutkan fungsi-fungsi kenabian dalam menjaga agama Islam dan mengatur urusan-urusan duniawi. Pemerintah mempunyai peranan penting dalam mewujudkan pasar yang Islami. Intervensi pemerintah dalam pasar bukan hanya bersifat

¹⁷ Sukarno Wibowo & Dedi Supriad, *Ekonomi Mikro Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 67.

temporer dan minor, tetapi ia akan mengambil peranan yang besar dan penting.

Peran pemerintah dalam pasar ini secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Peran yang berkaitan dengan implementasi nilai dan moral Islam.
- b. Peran yang berkaitan dengan teknis operasional mekanisme pasar.¹⁸

Adapun yang menjadi contoh peran pemerintah yang berkaitan dengan implementasi moralitas Islam adalah sebagai berikut:

- a. Memastikan dan menjaga implementasi nilai dan moral
- b. Islam secara keseluruhan Memastikan dan menjaga agar pasar hanyamemperjualkan belikan barang dan jasa yang halal.
- c. Melembagakan nilai-nilai persaingan yang sehat (fair play), kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Dalam konteks ini, pemerintah juga harus menjadi al-muhtasib yang memiliki wewenang luas dalam mencegah dan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran nilai-nilai ini.
- d. Menjaga agar pasar hanya menyediakan barang dan jasa. Barang dan jasa untuk kemewahan dan bersenang-senang akan sangat dibatasi bahkan dilarang seandainya terdapat kebutuhan mendesak terhadap barang-barang primer.

Untuk itu, pemerintah harus membuat perencanaan pasar yang berbasiskan prioritas kebutuhan dan mengarahkan para pelaku pasar untuk memenuhi perencanaan ini. Pemerintah juga dapat bertindak sebagai

¹⁸ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 76.

pelaku pasar aktif (produsen) untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan prioritas syariah dan kepentingan nasional.¹⁹ Sedangkan peran pemerintah yang khusus berkaitan dengan mekanisme pasar adalah sebagai berikut :

- a. Secara umum memastikan dan menjaga agar mekanisme pasar dapat bersaing dengan sempurna. Pemerintah harus menjamin kebebasan masuk dan keluar pasar, menghilangkan berbagai hambatan dalam persaingan seperti monopoli, menyediakan informasi, membongkar penimbunan, melarang kartel-kartel yang merugikan dan lain-lain.
- b. Membuat berbagai langkah untuk meningkatkan daya saing dan daya beli dari para pelaku pasar yang lemah, misalnya produsen kecil dan konsumen miskin.
- c. Mengambil berbagai kebijakan untuk menciptakan harga yang adil, terutama seandainya persaingan yang sempurna tidak dimungkinkan terjadi pada pasar. Monopoli tidak selalu akan berdampak buruk bagi masyarakat seandainya harga yang dihasilkan tetap merupakan harga yang adil.²⁰

Dalam menjalankan perannya, pemerintah mempunyai beberapa instrumen kebijakan, antara lain sebagai berikut :

- a. Manajemen produksi dan ketenagakerjaan di sektor publik. Pemerintah dapat berperan efektif dalam mengelola kekayaan publik. Mengatur

¹⁹ Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani, 1997), 89.

²⁰ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pusaka Setia, 2000), 90.

produksi dan ketenagakerjaan pada sektor ini dapat mempunyai pengaruh besar dalam perekonomian secara keseluruhan.

- b. Instrumen yang berkaitan dengan upaya mendorong kegiatan sektor swasta, misalnya menetapkan regulasi bagi sektor swasta, melakukan redistribusi faktor produksi, al-hisbah, perlindungan bagi masyarakat lemah.
- c. Pricing policy, dimana negara meregulasi harga dengan cara intervensi pasar, penetapan harga, atau mendorong kebijakan diskriminasi harga untuk kelompok masyarakat daerah. Pricing policy ini juga perlu dilakukan ketika pasar tidak dapat bersaing sempurna sehingga harga yang dihasilkan tidak merugikan masyarakat.
- d. Kebijakan fiskal, yaitu pengelolaan APBN disesuaikan dengan prinsip-prinsip keuangan publik Islam.
- e. Kebijakan pembiayaan dan moneter.
- f. Investasi kekayaan dan surplus sektor publik.²¹

²¹ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam* (Jakarta: Bumi Kasara, 1991), 59.

BAB III

**PELAKSANAAN PROGRAM PEMERINTAH DALAM
MEMPERTAHANKAN DAYA SAING PEDAGANG PASAR LEGI
KABUPATEN PONOROGO**

A. Deskripsi Umum Tentang Pasar Legi Kabupaten Ponorogo

1. Sejarah Pasar Legi Kabupaten Ponorogo

Pasar Legi telah berdiri sejak tahun 1827. Ada beberapa pasar yang tersebar di area Ponorogo. Pasar pon di Kota Lama yang sekarang termasuk dalam wilayah Babadan, pasar Pahing di kecamatan Balong, pasar Wage di kecamatan Kauman, dan pasar Legi ditengah kota, sampai saat ini.¹

Kota Ponorogo tidak memiliki stasiun kereta, namun dimasa lalu stasiun kereta berada didekat Pasar Legi. Setelah stasiun kereta ini tidak dipakai lagi maka beralih fungsi sebagai perluasan area pasar Legi. Pasar terdiri atas pasar pagi atau sering disebut dengan pasar subuh dan siang. Kegiatan pasar subuh telah dimulai sejak dini hari dengnngan kebanyakan pedagang hasil bumi dari luar kota berdatangan serta para pedagang sayur keliling mulai mempersiapkan dagangannya. Sedangkan pasar siang yang merupakan pasar utama, menjual bukan

¹ Sejarah pasar legi songgolangit Ponorogo, <https://situsbudaya.id/sejarah-pasar-legi-songgolangit-ponorogo/>, (diakses pada tanggal 5 april 2022, jam 13.30.)

hanya hasil bumi, melainkan kebutuhan sandang, pangan dan kebutuhan sampingan lainnya.

Berdasarkan sejarah modern sampai pada awal tahun 2000-an pasar ini bernama pasar legi, yang merupakan salah satu nama hari dalam sistem penanggalan Jawa. Pasar legi mengalami kebakaran pada tahun 2002. Pasca kebakaran pasar ini direnovasi total sehingga jauh berbeda dengan kondisi awalnya. Bangunan pasar setelah direnovasi cukup modern jika dibandingkan dengan sebelumnya peristiwa kebakaran. Jika sebelumnya sebagian besar pasar masih beralaskan tanah setelah dibangun pasar ini memiliki dua lantai dengan bangunan yang permanen. Pasar legi kembali mengalami kebakaran pada bulan Mei 2017 dengan kurang lebih 500-an kios terbakar kemudian dilakukan relokasi bekas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Harjono.

2. Letak Geografis

Ponorogo adalah Kabupaten di Provinsi Jawa Timur Indonesia. Kabupaten ini terletak di Koordinat $111^{\circ} 17'$ - $111^{\circ} 52'$ BT dan $7^{\circ} 49'$ - $8^{\circ} 20'$ LS dengan ketinggian antara 92 sampai dengan 2.563 meter di atas permukaan laut dan memiliki luas wilayah 1.372,78 km². Kabupaten ini terletak di bagian barat provinsi Jawa Timur dan berbatasan langsung dengan provinsi Jawa Tengah atau lebih tepatnya

220 km arah barat daya dari ibu kota provinsi Jawa Timur, Surabaya.²

Batas wilayah kabupaten ponorogo adalah sebagai berikut:

Utara : Kabupaten Madiun, Magetan, dan Nganjuk

Selatan : Kabupaten Pacitan dan Trenggalek

Barat : Kabupaten Pacitan dan wonogiri (Jawa Tengah)

Timur : Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek

Kabupaten Ponorogo mempunyai luas wilayah 1.371,78 km₂ yang dibagi dua menjadi sub-area, yaitu meliputi dataran tinggi yang meliputi Kecamatan Ngrayun, Sooko, Pulung, dan Ngebel sisanya merupakan area dataran rendah. Sungai yang melewati ada 14 sungai dengan panjang antara 4 sampai 58 km sebagai sumber irigasi bagi lahan pertanian dengan produksi padi maupun hortikultura. Sebagian besar dari luas yang ada terdiri dari area lahan sawah sisanya digunakan untuk tegal pekarangan, kabupaten Ponorogo memiliki dua musim yaitu penghujan dan kemarau.

Kabupaten Ponorogo terdiri atas 21 kecamatan yang menjadi 279 desa dan 26 kelurahan. Jarak ibukota Ponorogo dengan ibukota provinsi Jawa Timur (Surabaya) kurang lebih 200 km arah timur laut dan ibukota (Jakarta) kurang lebih 800 km arah barat. Penelitian ini dilakukan dipasar Legi Kabupaten Ponorogo, yang terletak di Kecamatan Ponorogo, kabupaten Ponorogo, di Jl. Soekarno Hatta

² Kabupeaten Ponorogo-wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia, https://id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten_ponorogo, (diakses pada tanggal 5 april 2022, jam 14.00)

Banyudono, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.

Adapun batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : jalan kampung
- b. Sebelah selatan : pemukiman penduduk
- c. Sebelah barat : Akademi Keperawatan
- d. Sebelah timur : jl. Raya Ponorogo-Madiun

Ruas jalan disebelah timur merupakan akses jalan besar arah Madiun Ponorogo, sedangkan jalan didepan pasar dahulunya merupakan pertokoan dan warung, sampai sekarang masih berjualan. Jalan tersebut adalah jaoan alternatif ke arah Tambakbayan maupun tembusan Madiun-Ponorogo.³

3. Sarana dan prasarana

Lapak bagi para pedagang adalah unsur yang paling penting disebuah pasar, karena lapak merupakan tempat bagi pedagang menjajakan barang dagangannya. Lapak dipasar legi ini beragam, ada yang menggunakan kios dan stand, dan semua pedagang masuk kedalam bangunan pasar. Terdapat 4 los untuk untuk menampung pedagang, yaitu los 1, 2, 3 yang membujur dari selatan keutara untuk pedagang pasar legi, sedangkankan 4 los yang melintang barat ke timur, untuk pedagang bekas stasiun dan bekas pengadilan negeri.

³ Letak Geografis, <https://putrinuruljannah.wordpress.com/profil-2/geografis/>, (diakses pada tanggal 5 april 2022, jam 14.30)

Sarana dan prasarana lainnya pada pasar Legi yaitu: tempat parkir, kamar mandi, mushola, dan tempat pengelolaan sampah untuk itu setiap pedagang berkewajiban membayar biaya penerangan dan biaya air yang disediakan serta dipungut retribusi untuk kebutuhan pasar. Kamar mandi didalam pasar tersebut ditarif Rp.1.000, sedangkan tempat parkir terletak dibawah, tempat parkir dikelola oleh tukang parkir yang berada dibawah naungan bidang pasar dengan mematok tarif Rp. 1.500 (seribu lima ratus rupiah) untuk sepeda motor, sedangkan mobil Rp. 2.000. (dua ribu rupiah). Bapak Wahyudin mengatakan: "begini mbak, jadi sudah ada ketetapan yang dilakukan oleh pemerintah dalam penarikan retribusi, yang meliputi biaya investasi, biaya administrasi, biaya keamanan, dan biaya biaya operasional dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan".⁴

4. Kondisi Pasar Legi

Pasar Legi adalah pusat perbelanjaan pasar tradisional yang dibangun pemerintah guna mensejahterakan pedagang pasar legi yang terbesar diwilayah Ponorogo. Pasar direlokasikan ke bekas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Harjono setelah kejadian kebakaran pada tahun 2019. Dengan kebijakan pemerintah daerah pasar dimana didalam pasar terdapat lapak, kios, los, warung. Pedagang dapat menempati lapak, kios, los, toko untuk berdagang dengan status kepemilikan hak

⁴ Wahyudin, wawancara, 5 april 2022

guna. Terdapat 4 los, perlos nya memiliki kios, lapak, toko yang masing-masing ukuran dan jumlahnya sebagai berikut:

- a. 22 toko luas per@ 2x2 meter
- b. 90 lapak luas per@ 1,6x1 meter
- c. 326 kios luas per@ 2x1,35 meter
- d. 375 kios luas per@ 2x1 meter

Para pedagang yang berjualan dipasar Legi memiliki larangan dan kewajiban ssebagai pedagang.

a. Larangan bagi pemegang surat keterangan bukti hak pemakaian tempat usaha/berjualan (BPTU).

1) Pedagang selaku pemegang surat keterangan Bukti Hak Pemakaian Usaha/Berjualan dilarang:

- a) Menggunakan fasilitas yang ada dipasar untuk tempat tinggal/rumah tangga.
- b) Menawarkan, menyimpan, dan mempergudangkan barang-barang terlarang.
- c) Melakukan perjudian dalam bentuk apapun dan melakukan kegiatan, usaha dan perbuatan yang dapat membahayakan kesehatan, kenyamanan, kemanan dan ketertiban umum serta bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- d) Menggunakan tempat usaha/berjualan khusus untuk gudang.
- e) Berada didalam pasar sebelum pasar dibuka/ditutup.

- f) Menggunakan tempat usaha/berjualan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
 - g) Membawa atau menyimpan kendaraan bermotor maupun tidak bermotor di lorong-lorong atau didalam pasar.
- 2) Tanpa seizing Dinas INDAKOP DAN UKM Kabupaten Ponorogo, pedagang dilarang:
- a) Menawarkan, menyimpan dan memperdagangkan barang-barang yang mudah terbakar dan bahan kimia yang berbahaya.
 - b) Menambah, mengubah dan membongkar bangunan, baik bangunan milik Pemerintah daerah maupun bangunan swadaya.
 - c) Mengalihkan atau memindahkan Hak Pemakaian Tempat Usaha/Berjualan kepada pihak lain.
- 3) Kewajiban-kewajiban bagi pemegang surat keterangan bukti hak pemakaian tempat usaha/berjualan (BPTU).
- a) Membayar retribusi pelayanan pasar sesuai dengan peraturan daerah nomor 14 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum dan pungutan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Kabupaten Ponorogo.
 - b) Bagi pedagang yang berjualan didalam los/kios swadaya, maka seluruh biaya pemeliharanya menjadi tanggung jawab pedagang yang bersangkutan.

- c) Melakukan heregistrasi (perpanjangan surat keterangan) setiap 3 tahun ke Dinas INDAKOP DAN UKM Kabupaten Ponorogo apabila pemegang surat keterangan bukti hak pemakaian tempat usaha/berjualan (BPTU) masih melanjutkan pemakaian tempat usaha/berjualan.

5. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya masyarakat Ponorogo yang sejahtera yang bertumpu. Pada mekanisme pasar yang berkeadilan, menuju daerah industri baru sekaligus masyarakat niaga yang tangguh, serta mewujudkan rahayuning Bumi Reyog.

b. Misi

- 1) Mewujudkan koperasi dan UMKM yang mandiri dan berdaya saing.
- 2) Meningkatkan pembinaan dan pengembangan industri kecil menengah berbasis sumber daya daerah
- 3) Meningkatkan pembinaan dan pengembangan pasar, distribusi, promosi, peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, pengembangan usaha, pengawasan barang beredar, peningkatan ekspor dan perlindungan konsumen.
- 4) Meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana.⁵

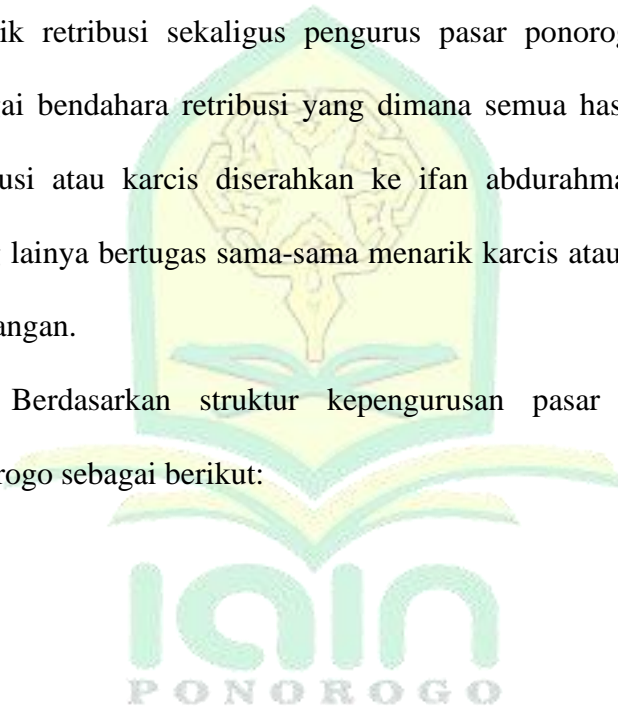
⁵ Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo didalam <https://indakop.ponorogo.go.id/indakop-ponorogo-go-id/visi-misi-2>, (diakses pada tanggal 5 april 2022, jam 21.00)

6. Struktur Kepengurusan

Pasar legi merupakan asset milik pemerintah Kabupaten Ponorogo. Manajemen atau pengelolaan pasar legi berada dibawah tanggung jawab Dinas Pngelolaan Pasar Kabupaten Ponorogo yang beralamatkan di jl. dr. Cipto Mangunkusumo No.92 Kecamatan Ponorogo, Kabupaten ponorogo.

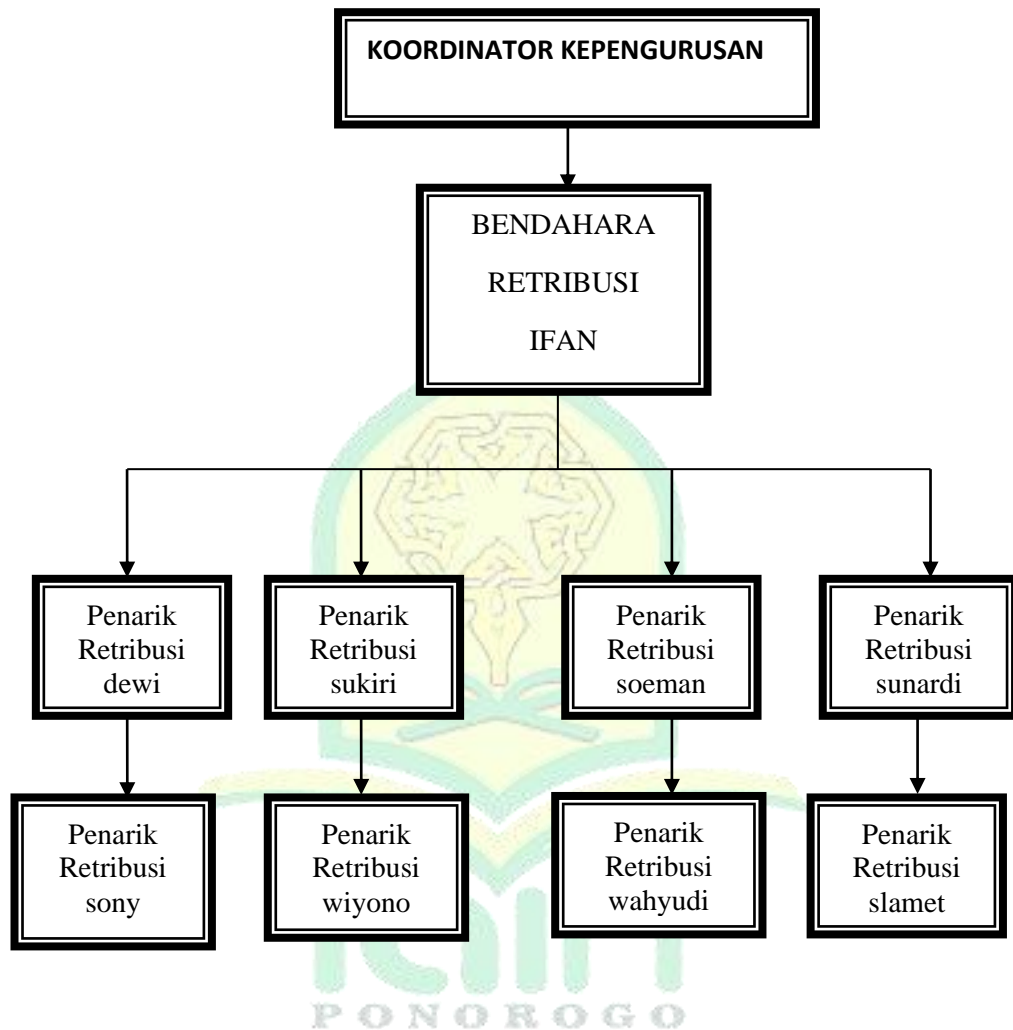
Berdasarkan struktur koordinator pengurus bahwa ada 9 orang penarik retribusi sekaligus pengurus pasar ponorogo tersebut, ifan sebagai bendahara retribusi yang dimana semua hasil dari penarikan retribusi atau karcis diserahkan ke ifan abdurahman. Sedangkan 8 orang lainnya bertugas sama-sama menarik karcis atau penarik retribusi dilapangan.

Berdasarkan struktur kepengurusan pasar legi Kabupaten Ponorogo sebagai berikut:



Bagan 1 struktur organisasi

Pasar Legi Kabupaten Ponorogo



B. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Kebijakan

Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo khususnya Dinas Perdagangan dalam upaya membantu mengentaskan dan memberdayakan para pedagang kecil di pasar, membuat suatu kebijakan, yaitu kebijakan alokasi dan kebijakan relokasi. Hal ini dimaksudkan untuk membantu para pedagang dalam menghadapi banyaknya persaingan pasar seperti banyaknya pasar modern dan banyaknya E-commerce yang sudah tersebar

membuat pemerintah mengeluarkan kebijakannya dimana dalam kebijakan tersebut adanya pembangunan pasar kembali pasca kebakaran dan dipindahkan sementara waktu kemudian pemerintah mampu membangun kembali pasar tersebut sehingga mampu ditempati dengan layak kembali. Kemudian kelengkapan sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah guna kenyamanan antara pedagang dan pembeli, sehingga diharapkan para pembeli mampu kembali bertransaksi dipasar legi sebab fasilitas sarana dan prasarana hingga bangunan pasar yang telah disediakan oleh pemerintah pun sudah menjadi cukup baik dari sebelumnya. Sehingga demikian ada beberapa peran pemerintah yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan.

Adapun hasil wawancara penulis dengan pegawai Dinas Perdagangan mengenai peran pemerintah terutama dinas perdagangan ini dalam melaksanakan kebijakan yang telah dibuat untuk Pasar Legi kabupaten Ponorogo.

Bapak Heru mengatakan:

"Begini mbak memang ini sudah menjadi kebijakan pemerintah kemudian yang diberikan amanah untuk langsung menjalankan semua hal ini ya dari Dinas Perdagangan ini, nah awal mula adanya kebijakan ini banyak masyarakat atau pedagang yang menolak secara mentah-mentah. Mereka berfikir kalau kebijakan pemerintah hanya menguntungkan pemerintah saja. Tapi ya lama kelamaan setelah diberikan arahan ya pelatihan juga mereka sudah mulai paham mbak kalau kebijakan ini dibuat untuk membantu mengentaskan perekonomian pasar tradisional ditengah banyaknya pasar modern ini mbak".⁶

⁶ Heru, *Wawancara*, 07 Maret 2021

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa persepsi dari pegawai Dinas Perdagangan terhadap banyaknya masyarakat yang belum bisa menerima kebijakan dari pemerintah sehingga butuh waktu beberapa lama untuk bisa meyakinkan kepada mereka.

Kemudian pak heru melanjutkan penjelasannya mengenai apa saja peran Dinas Perdagangan dalam pelaksanaan Kebijakan.

"ada beberapa peran mbak dari dinas perdagangan ini dalam menjalani kebijakan yang telah dibuat, yang pertama itu mengenai pengkoordinasian program dan semua kegiatan yang berkaitan pemberdayaan pedagang pasar semisal contohnya kaya pemberian pelatihan biar pedagang itu lebih banyak lagiawasannya mbak. Trus ada lagi mbak itu kaya sistem pemantauan kalo istilahnya ya monitoring ya, la itu pedagang setiap dalam perjalanan pelatihan biar pemahamannya lebih kuat haus diawasin juga, dimana mereka sudah faham apa belum terhadap pelatihan yang diberikan nah setelah itu dilakukanlah evaluasi. Biar kedepannya lebih baik dan tau kurangnya para pedagang ini dibagian mananya gitu mbak. Trus yang terakhir itu laporan secara berkala kepada atasan, bahwasanya kebijakan yang dilakukan ini tu dapat berjalan apa tidak gitu mbak ya kurang lebih sama evaluasi sebenarnya mbak".

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dari pemerintah dalam membuat kebijaksanaan pada awalnya juga belum dapat diterima dengan baik oleh masyarakat atau pedagang pasar. Namun pada lama kelamaan mereka mau menerima kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kemudian pemerintah juga memiliki beberapa peran yang bertujuan untuk memfasilitasi agar masyarakat atau pedagang bisa menjadi pedagang yang memiliki wawasan yang lebih baik lagi agar mampu bertahan dan bersaing di era banyaknya pasar modern yang berdiri pada saat ini.

Adapun hasil wawancara penulis dengan beberapa pedagang mengenai kebijakan yang telah dibuat pemerintah serta peranan pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan.

Bu Murtini mengatakan:

"yo piyo yo mbak biasane pemerintah ki nek ngekei kebijakan ki yo ora sesuai karo keadaan e pasar e piye, dadi yo ko pedagang dewe okeh sing nolak pas awal-awal pemerintah ngomongi nek bakalan enek kebijakan baru. Tapi yo masyarakat cilik ngene iki manut ae mbak piye peraturan e. terus koyo peran pemerintah perkoro ngenekne pelatihan kae yo enek mbak neng yo ora kabeh mbak muk sebagian ae sing dikei pelatihan, y owes ngnu iku lah intine mbak".⁷

Pemerintah memberikan kebijakan tidak sesuai dengan keadaan pasarnya bagaimana, sedangkan pemerintah memberikan dua kebijakan yaitu kebijakan alokasi dan kebijakan relokasi. Dimana selain dua kebijakan tersebut pemerintah juga memberikan pelatihan yang diadakan untuk para pedagang namun pada kenyataannya hal tersebut belum dapat diterapkan secara merata.

Begitupun juga disampaikan oleh bu husna selaku pedagang:

"awal-awal kebijakan baru itu ya agak bingung sebenarnya mbak, mau ada apa lagi gitu mbak tapi ya udah saya sebagai pedagang ngikut saja gimana baiknya aja mbak, trus kalo masalah pelatihan itu saya sendiri belum pernah ikutan mbak jadi saya kurang tau juga mbak gimana, ya mungkin pelatihannya ndak semua langsung jadi satu mbak makanya ya masih sebagian aja yang diberi pelatihan gitu mbak".⁸

Pada awal mula adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, pedagang merasa bingung. Akan ada kebijakan seperti apa yang akan

⁷ Murtini, *Wawancara*, 07 April 2022.

⁸ Husna, *Wawancara*, 07 April 2022.

dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah memberikan dua kebijakan sekaligus kepada para pedagang untuk membantu dalam mengentaskan perekonomian, namun selain adanya kebijakan pemerintah juga memberikan pelatihan kepada para pedagang agar menjadikan para pedagang sebagai pelaku ekonomi yang lebih tangguh. Namun pada kenyataannya hal tersebut belum mampu teratasi secara optimal.

Begitupun juga disampaikan oleh bu nur selaku pedagang:

"saya ya setuju-setuju aja mbak nek pemerintah itu buat kebijakan baru biar pasar juga makin maju kedepannya biar bisa ngangkat perekonomian lagi lah mbak ya matapencaharian e ya gur pedagang gini nek ndak jualan ya darimana lagi rezekinya mbak. Trus nek pelatihan iku ya terkait penggunaan produk lokal gitu mbak, kaya mengutamakan penggunaan produk lokal gimana caranya biar bisa dikenal diluar ya diinovasi gitu mbak intinya".⁹

Sebagian pedagang ada yang menyatakan setuju dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, dengan demikian diharapkan pemerintah khususnya dinas perdagangan diharapkan mampu membantu dalam memperbaiki perekonomian yang kian terpuruk sebab banyaknya pasar modern yang beredar yang didirikan juga oleh pemerintah. Terkait pelatihan yang dibuat belum sepenuhnya dapat terealisasikan dengan sempurna mengingat banyaknya pedagang yang juga berjualan dipasar legi ini.

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwasanya menurut para sebagian pedagang bahwasanya dari kebijakan yang telah mereka

⁹ Nur, Wawancara, 07 April 2022.

buat belum merata pelaksanaannya, sehingga dari mereka semua belum merasakan fasilitas yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri. Untuk itu pemerintah masih harus lebih banyak memperhatikan bagaimana jalannya peran yang telah mereka jalani. Dan dari hasil observasi penulis menunjukkan bahwa, pelaksanaan program pemerintah belum sepenuhnya dapat diterapkan kepada para pedagang pasar legi, sebab belum meratanya pelatihan yang dibuat pemerintah guna penambahan wawasan pedagang agar menjadi pedagang yang lebih tangguh di era banyaknya pasar modern yang berdiri pada saat ini. Untuk itu pemerintah harus lebih banyak dalam mengevaluasi jalannya kebijakan yang telah dibuat pula.

C. Strategi Yang Digunakan Dalam Kebijakan Pemerintah

Strategi merupakan sebuah keunggulan kompetitif yang memiliki tujuan untuk merencanakan suatu hal dengan cara yang strategis. Perencanaan jangka panjang yang disusun untuk menghantarkan pada suatu pencapaian akan tujuan dan sasaran tertentu.

Hasil wawancara dengan bapak Heru salah satu pegawai Dinas

Perdagangan:

"begini mbak dalam menjalankan kebijakan pemerintah ya memang menggunakan beberapa strategi, ya salah satunya memanfaatkan teknologi untuk memperoleh dan memberi informasi, jadi kalau ada berita apa kan pemerintah lebih dulu tau to mbak nah itu disalurkan lagi ke masyarakat atau pedagang pasar legi, terus pemerintah juga menyediakan sarana dan prasarana biar pedagang maupun pembeli tetap merasa nyaman mbak. Dulu kan pasar legi ini kumuh kotor gitu tapi sekarang ya udah enak banget fasilitas yang diberikan ya cukup memadai mbak. Terus pemerintah membantu dalam pengembangan kualitas kemampuan usaha

ya dengan memfasilitasi pelatihan mbak, ya dengan melakukan pelatihan dan pendampingan gitu, sama memberikan arahan juga tentang pemakaian sumber daya lokal biar bisa menjadi produk unggulan daerah mbak".¹⁰

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan adanya sebuah strategi yang dibuat oleh pemerintah dimana yang ditujukan kepada para pedagang agar nantinya pedagang pasar tradisional memiliki kualitas dalam berdagang juga cukup baik sehingga tetap bisa bersaing di era banyaknya pasar modern. Sehingga pemerintah mengambil langkah dalam mengambil suatu kebijakan untuk membantu mengangkat perekonomian para pedagang pasar legi Kabupaten Ponorogo.

Adapun hasil wawancara penulis dengan beberapa pedagang di pasar legi Kabupaten Ponorogo mengenai apa saja strategi yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan?

Bapak Wawan menjawab:

"kalau yang saya lihat ya mbak strategi yang digunakan pemerintah yang udah saya rasakan itu ya kalo mengenai kecepatan informasi itu masih belum e mbak, kadang kenaikan harga itu informasinya juga masih belum cepet kok mbak, nek fasilitas sarana prasarana ne udah enak mbak, kaya kamar mandi yang bersih trus sama parkiran yang luas juga masjid e juga nyaman adem mbak ya keadaan pasar wes membaik juga ndak kaya dulu mbak, nek pelatihan itu ya ada mbak paling ya pengarahan tentang penggunaan produk lokal biar bisa cepet berkembang, gitu aja sih mbak".¹¹

Strategi yang digunakan oleh pemerintah seperti mengadakan adanya sarana dan prasarana untuk pengguna pasar baik pedagang maupun pembeli atau konsumen sudah cukup baik dan dirasakan oleh para pengguna pasar, hal ini sudah cukup mempengaruhi kenyamanan

¹⁰ Heru, *Wawancara*, 07 Maret 2022.

¹¹ Wawan, *Wawancara*, 07 April 2022.

pengguna pasar itu sendiri. Kemudian untuk pelatihan yang juga diadakan oleh pemerintah sebagian sudah mulai terlaksana seperti sudah ada pedagang yang telah melakukan pelatihan yang diadakan oleh pemerintah khususnya dinas perdagangan ini.

Begitupun yang disampaikan bu Mistri selaku pedagang pasar legi:

"ya nek strategi pemerintah yang pasti udah kelihatan ya sarana dan prasarannya aja mbak, tapi nek informasi iku ya masih sering ketinggalan informasi juga mbak kan ya ndak semua pedagang disini tau teknologi mbak, ya maklum orang awam mbak nek ndak dikasih tau langsung nek sing ndak bisa hpnan ya ndak tau informasi apa-apa tenan mbak, ya nek pelatihan sebagian udah dapat pelatihan kayane mbak neng ya belum semuanya mbak, belum rata".¹²

Pemerintah sudah cukup baik dalam melaksanakan kebijakannya, namun dalam pemberian informasi terhadap para pedagang seperti adanya harga yang naik atau harga yang turun drastis belum optimal. Masih banyak pedagang yang mengeluhkan kurangnya informasi yang diperoleh dari pemerintah untuk pedagang, sehingga kurangnya bisa mengantisipasi dalam menghadapi naik turunnya harga pasar.

Begitupun yang disampaikan bu Siti Julaikha selaku pedagang pasar legi:

"begini mbak yang saya tau ya pemerintah itu sudah cukup memberikan fasilitas berupa sarana prasarana sudah cukup layak mbak, ya sudah lumayan memberikan kenyamanan buat pedagang dipasar legi juga, buat pembeli juga sudah nyaman mbak wes ndak umpel-umpelan panas sumuk kaya dulu lagi. Nek pas pemberian informasi mengenai kenaikan

¹² Mistri, *Wawancara*, 07 April 2022

harga atau apa kadang ya sek telat mbak belum cepet informasine mbak nek masalah itu, ya mungkin itu aja sih mbak".¹³

Begitupun yang disampaikan bapak Hendri selaku pedagang pasar legi:

"ya begini mbak seperti yang sudah samean lihat mbak kalau untuk fasilitas sarana prasarana yang sudah diberikan pemerintah y awes lebih dari cukup mbak, mungkin dari parkir trus los tempat berdagang ya udah bagus semua mbak pasar juga bersih mbak, ya meskipun sekarang dijatah mbak tempat jualannya ya menjadi lebih kecil juga tapi ya tidak apa-apa mbak, wes cukup Alhamdulillah banget masih diberi tempat yang sangat layak untuk digunakan".

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwasanya pemerintah juga belum optimal dalam pemberian informasi meskipun dalam fasilitas sarana prasarana sudah mampu dipenuhi namun dalam pemberian informasi penting dalam suatu hal juga tak jauh kalah pentingnya juga. Sehingga dengan adanya informasi yang lebih akurat dapat lebih memudahkan pedagang dalam menjalani kegiatan berdagang. Oleh sebab itu pemerintah harus lebih banyak lagi dalam melakukan evaluasi mengenai hal yang masih kurang dalam strategi yang mereka jalankan.

D. Dampak Kebijakan Pemerintah

Pelaksanaan kebijakan pemerintah yang dibuat oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Ponorogo yang telah disetujui oleh masyarakat atau pedagang pasar legi Kabupaten Ponorogo, berdasarkan wawancara dengan sebagian pedagang pasar legi mengenai dampak pelaksanaan kebijakan pemerintah terhadap para pedagang Kabupaten Ponorogo.

¹³ Siti Julaikha, *Wawancara*, 07 April 2022

Bapak nawir menjawab:

"nek menurut saya ya mbak sebenarnya dampaknya baik untuk pedagang bahkan nek pelatihan e sering dilakukan itu pedagang ya jadi banyak wawasan juga mbak. Trus nek dampak kurang baiknya itu di kurang akuratnya informasi mbak, semisal ada harga naik atau turun ndak cepet dikasih tau informasi yang rugi ya pedagang bahkan pembeli juga ya merasa dirugikan kadang mbak, ya itu lah pokoknya mbak".¹⁴

Dampak dari adanya kebijakan alokasi dan kebijakan relokasi yang dirasakan pedagang cukup baik, adanya pasar yang dibangun cukup layak dan sarana prasarana yang memadai cukup membantu dalam perekonomian. Namun ada dampak yang kurang baik yang terjadi seperti kurangnya informasi mengenai stabilisasi harga yang terkadang membuat pedagang merasa dirugikan pula.

Ibu Husna menjawab:

"ya ada dampak baik sama dampak kurang baiknya nek menurut saya ya mbak, nek dampak baiknya itu ya sekarang pedagang lebih giat lebih banyak wawasan juga setelah adanya pelatihan itu mbak, Cuma nek dampak kurang baiknya itu kurang meratanya melakukan pelatihan jadinya ya masih banyak yang belum tau mbak trus sama informasi juga mbak kadang masih suka ketinggalan informasi apalagi ya wong awam sing ga bisa pake handpone ini mbak kadang nek ada informasi penting nek sampek gatau kan eman ya mbak semisal kaya harga turun gitu trus ada pembeli sing beli barang dagangan gek belum tau nek harganya udah turun ya wes pake harga normal, jadine ya pembeli juga yang dirugikan mbak".¹⁵

Ibu Nur menjawab:

¹⁴ Nawir, *Wawancara*, 07 April 2022.

¹⁵ Husna, *Wawancara*, 07 April 2022.

"gini mbak nek menurut saya ya banyak dampak baiknya lah mbak yang dikasih dari pemerintah, nek dampak kurang baiknya ya mungkin pemerintah kurang dalam pemeriksaan harga pasar mbak, kurang penginformasian lah mbak istilahnya, jadi ya mungkin lebih ditekankan lagi kedepannya nek ada informasi penting itu ya nek bisa langsung dikasih informasi lah gitu mbak".¹⁶

Bapak Hendri menjawab:

"kalo menurut saya begini mbak, dampak yang sudah terjadi sejak adanya kebijakan pemerintah ini cukup baik mbak ya mungkin seperti sarana prasarananya yang sudah nyaman, kemudian kaya parkiran ya lebih luas sudah tidak kepanasan atau kehujanan juga mbak, masjid yang disediakan juga tidak jauh dari pasar trus ya pasar lebih bersih terawat juga mbak, udah enak bagus mbak, sejauh ini ya saya nyaman-nyaman aja mbak".¹⁷

Bu Mistri menjawab:

"kalo menurut saya mbak dampak dari kebijakan pemerintah ini dampak baik, ya dari fasilitas yang diberikan sarana prasarananya sudah bagus mbak sudah sesuai dengan keinginan para pedagang maupun konsumen mbak, jadi ya sudah mbak sudah nyaman aja mbak semuanya sudah bagus mbak".¹⁸

Bu Siti Julaikha Menjawab:

"menurut saya begini mbak dari kebijakan pemerintah ini ada dua dampak, ada dampak baik sama dampak buruknya, dampak baiknya itu sudah terpenuhinya semua fasilitas yang dibutuhkan pedagang maupun pembeli mbak, pengguna pasar lah intinya mbak, tapi dampak buruknya itu ya masalah informasi yang kurang akurat mbak, itu selain bisa merugikan pedagang ya merugikan pembeli juga mbak, itu susahnya mbak, ya itu aja nek dari saya mbak".¹⁹

¹⁶ Nur, *Wawancara*, 07 April 2022.

¹⁷ Hendri, *Wawancara*, 07 April 2022.

¹⁸ Mistri, *wawancara*, 07 April 2022.

¹⁹ Siti Julaikha, *Wawancara*, 07 April 2022.

Bapak Wawan Menjawab:

"kalo menurut saya mbak untuk dampak dari kebijakan pemerintah ini ada dampak baiknya ada dampak buruknya juga mbak. Ya baiknya itu sudah banyak fasilitas sarana prasarana yang disediakan, Cuma untuk dampak buruknya itu kurangnya evaluasi dari pemerintah mengenai kurangnya sumber penginformasian dengan cepat mbak makanya kadang banyak pedagang yang mengeluhkan kurangnya dari pemerintah mengenai perbaikan informasi lagi gitu mbak".²⁰

Dari hasil wawancara diatas dapat menunjukkan bahwa ada dua dampak yaitu dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positif yang ditimbulkan adalah banyaknya fasilitas sarana dan prasarana yang telah bisa dinikmati oleh pedagang maupun pembeli pasar legi Kabupaten Ponorogo, dengan demikian kenyamanan dalam berbelanja dapat dinikmati oleh pengguna pasar legi itu sendiri, sehingga memungkinkan banyak konsumen yang ingin berbelanja di pasar tradisional pasar legi yang mana harga yang dibandrol dipasar tradisional lebih murah dibandingkan pasar modern dengan harga pas yang tidak bisa ditawar. Sedangkan untuk dampak negatifnya yaitu kurangnya evaluasi dari pemerintah dalam hal penyampaian informasi, sehingga kurangnya informasi yang didapat seperti stabilisasi harga sehingga kurang bisa terkontrolnya masalah tersebut dan biasanya yang banyak dirugikan itu pihak pembeli karna tidak jarang mereka juga memperoleh informasi mengenai harga barang dari penjual pasar tradisional itu sendiri.

²⁰ Wawan, *Wawancara*, 07 April 2022.

BAB IV

ANALISIS PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TERHADAP UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMPERTAHANKAN DAYA SAING PARA PEDAGANG PASAR LEGI KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Peran Pemerintah Dalam Pelaksanaan Kebijakan Dalam

Perspektif Ekonomi Islam

1. Peranan Alokasi

Berdasarkan paparan diatas menunjukkan bahwa pemerintah membantu dalam penyediaan barang yang tidak disediakan oleh pasar atau barang publik. Dengan demikian perlu adanya campur tangan pemerintah untuk membantu dalam pengadaan barang atau jasa yang tidak bisa disediakan oleh pasar seperti misalnya udara bersih, tempat yang nyaman, dan lain-lain. Tidak dapat tersedianya barang publik oleh sistem pasar maka disebut dengan kegagalan pasar. Maka pemerintah harus lebih memperhatikan jalannya kegiatan pasar. Dalam hal ini mengajarkan untuk selalu menghubungkan kepada Allah, sebab pemerintah merupakan pemegang amanah Allah untuk menjalankan tugasnya dalam mweujudkan kesejahteraan dan keadilan serta tata kehidupan yang baik bagi seluruh umat.

Berdasarkan data dan teori diatas menurut analisis peneliti menunjukkan bahwasanya fakta yang terjadi dilapangan sudah sesuai

dengan teori peranan alokasi dalam perspektif ekonomi Islam dimana dalam menjalankan kebijakannya sudah sesuai dan baik. Dalam hal ini diketahui bahwasanya pemerintah sudah mampu menyediakan tempat yang nyaman yang dapat digunakan oleh pedagang pasar legi maupun pembeli dipasar legi kabupaten Ponorogo, dengan demikian terciptalah kenyamanan antara pengguna pasar dan pemerintah yang telah mampu mengupayakan dalam memberikan fasilitas sebagai pendorong dalam menarik perhatian para pembeli sehingga tetap ingin berbelanja dipasar tradisional legi ini sehingga pedagang masih mampu mempertahankan daya saing di era banyaknya pasar modern yang telah berdiri sekarang ini.

2. Peranan Distribusi

Berdasarkan paparan data diatas menunjukkan bahwa pemerintah kesulitan dalam menjalankan perannya sebab terkait dengan keadilan. Dalam hal ini pemerintah dapat dikatakan berhasil dalam menjalankan tugasnya apabila kebijakan yang telah mereka buat tidak saling berbenturan seperti memperbaiki kondisi suatu golongan tetapi tidak memperburuk kondisi golongan lain. Oleh karena itu untuk menangani suatu keadaan permintaan dan penawaran yang kurang efisien terkadang membuat perekonomian pada suatu pasar menjadi tidak stabil, maka pemerintah harus mengambil tindakan bagaimana agar tetap stabil dalam menghadapi perekonomian yang tidak stabil dengan banyaknya pelaku ekonomi dengan kondisi golongan yang

berbeda. Dalam peran ini mengajarkan kepada pemerintah bahwasanya sesama muslim kita selalu diajarkan untuk selalu berbuat adil kepada semua pelaku usaha atau ke semua golongan sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Sebab kurangnya keadilan dalam pendistribusian barang maupun jasa dapat terjadi kesenjangan sosial yang dapat timbul kapan saja.

Berdasarkan data dan teori diatas menurut analisis peneliti menunjukkan bahwa fakta yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan teori peranan distribusi, dimana pemerintah dalam menjalankan perannya sebagai distributor belum mensama ratakan dalam hal pendistribusian, sehingga masih banyak pelaku usaha yang merasakan ketidakadilan yang dibuat oleh pemerintah. Dengan hal ini dapat diketahui bahwasanya pemerintah belum menggunakan peranan distribusi dalam menjalankan perannya, mereka hanya melakukan distribusi kepada sebagian pelaku usaha saja namun sebagian pelaku usaha lainnya merasakan tidak adilnya peran pemerintah.

3. Peranan Stabilisasi

Berdasarkan paparan data diatas menunjukkan bahwasanya pemerintah berperan utama dalam hal stabilisasi perekonomian. Dengan peran pemerintah yang secara langsung menganani dalam hal stabilisasi perekonomian maka kemungkinan dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga sebelumnya, seperti halnya menurunnya daya beli suatu barang maka pemerintah perlu mengurangi dalam hal

produksi agar tidak terjadinya pengangguran dalam jumlah besar. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan Islam maka pemerintah harus lebih memperhatikan stabilisasi harga maupun daya beli suatu barang agar tidak banyak barang yang menganggur dan mengakibatkan kemubaziran. Sehingga dari pelaku usaha tidak merasakan kerugian yang begitu banyak pula.¹

Berdasarkan data dan teori diatas menurut analisis peneliti menunjukkan bahwa fakta yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan peran yang dijalankan oleh pemerintah. Dalam penjalanannya pemerintah masih belum maksimal dalam membantu stabilisasi pasar, dari hal stabilisasi harga masih banyak pedagang yang mengeluhkan kurangnya penginformasian dalam hal kenaikan atau penurunan harga sehingga dalam hal penyediaan barang pun pedagang belum bisa bersiap-siap dalam menyiapkan kemungkinan yang akan terjadi jika tiba-tiba harga melonjak naik atau menurun secara drastis. Dengan hal ini menunjukkan bahwasanya pemerintah jika dihubungkan dengan prinsip stabilisasi perlu dievaluasi lagi kedepannya agar kehidupan para pelaku usaha dipasar legi lebih terjamin dan tidak mengalami kerugian yang besar. Dalam Islam pun sudah disebutkan bahwasanya Allah tidak menyukai hal-hal yang mubazir, sehingga dengan adanya stabilisasi pasar ini dapat digunakan agar lebih tertatanya lagi kehidupan para pelaku usaha.

¹ Suparmoko, *Ekonomi Pembangunan* (Jakarta: Penerbit BPFJ Jogjakarta, 1985), 98.

B. Analisis Strategi Pemerintah Dalam Peningkatan Daya Saing

1. Memanfaatkan Teknologi dalam Memperoleh dan Pemberian informasi.

Dalam hal ini banyaknya teknologi yang sudah mulai berkembang pesat memudahkan pemerintah dalam memperoleh informasi penting dari atasan dan menyampaikan kembali kepada para pelaku usaha seperti halnya penginformasian mengenai adanya naik atau turunnya harga pasar yang sesuai dengan ketentuan Harga Eceran Tertinggi, sehingga adanya informasi yang akurat dapat memberikan kenyamanan bagi pelaku usaha dalam hal memperoleh informasi yang akurat dan benar pula, sebab pembeli pun mendapatkan informasi harga dari pedagang jika saja pedagang tidak tahu mengenai harga pasar maka pembeli akan merasa dirugikan oleh pedagang.

Berdasarkan paparan data diatas, menurut analisis peneliti menunjukkan bahwa pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang telah dibuat belum maksimal dalam penyampaian informasi. Masih banyak dari pedagang yang mengeluhkan banyaknya yang masih belum menerima informasi secara akurat, masih adanya pedagang yang menjual harga barang dagangannya yang tidak sesuai dengan Harga Eceran tertinggi sehingga banyak pedagang yang merasa dirugikan pula. Oleh karena itu menurut penulis masih perlu banyak evaluasi lagi yang dilakukan oleh pemerintah agar terciptanya sistem

penginformasian yang baik dan akurat yang dapat diterima pula oleh para pelaku usaha atau pedagang pasar legi Kabupaten Ponorogo.

2. Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana

Dalam hal ini penyediaan sarana dan prasarana pada pasar legi Kabupaten Ponorogo sudah cukup memadai, mulai dari fasilitas yang diberikan cukup baik, sehingga pengguna pasar baik dari pedagang maupun pembeli merasakan kenyamanan dalam penggunaan fasilitas pasar. Oleh karena itu pemerintah harus tetap mempertahankan sarana prasarana yang telah diberikan untuk pasar tradisional legi ini. Dengan demikian pedagang mampu bersaing dalam mempertahankan daya saing pasar diantara banyaknya pasar legi Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan paparan data diatas menurut analisis peneliti menunjukkan bahwa pemerintah juga sangat memperhatikan dalam kenyamanan mengenai sarana dan prasarana untuk pengguna pasar tradisional legi ini. Mulai dari penyediaan parkir yang luas yang tidak keuhujan ataupun kepanasan, kemudian toilet yang layak masjid yang bagus, serta kebersihan dan kenyamanan pasar yang saat ini sudah bisa dirasakan kenyamanannya. Oleh sebab itu pemerintah harus tetap mempertahankan konsistensinya dalam memberikan sarana dan prasarana ini, untuk dijaga sehingga kedepannya bisa lebih baik lagi.

3. Mengembangkan kemampuan usaha pedagang pasar dengan melakukan pelatihan

Dengan adanya pelatihan yang diberikan kepada para pedagang dipasar legi diharapkan mampu memberikan hal yang lebih baik lagi terutama dalam hal pengetahuan mengenai menjadi pedagang yang baik dan cerdas itu bagaimana, kemudian adanya pelatihan diharapkan mampu memberikan pengetahuan mengenai pentingnya menggunakan produk lokal agar bisa menjadikan produk lokal menjadi produk yang lebih unggulan lagi kedepannya.

Berdasarkan paparan data diatas, menurut analisis peneliti menunjukkan bahwa pemerintah sudah cukup banyak memberikan pelatihan kepada para pedagang agar kualitas para pedagang dalam bersaing menghadapi banyaknya pasar modern menjadi lebih baik lagi. Namun menurut peneliti masih adanya pedagang yang belum mendapatkan pelatihan, jadi pemerintah seharusnya meratakan pelatihan yang dilakukan agar semua pedagang mendapatkan pelatihan yang layak dan menjadi pedagang yang cerdas dan tangguh, dengan demikian dapat menjadikan pasar tradisional menjadi pasar yang lebih baik kedepannya. Melakukan evaluasi agar mengetahui apakah semua pedagang sudah mendapatkan pelatihan yang diberikan oleh pemerintah tersebut. Disamping memberikan pelatihan pemerintah juga harus memberikan pendampingan agar apa yang telah didapatkan

para pedagang terhadap pelatihan tersebut dapat diterapkan pada pasar yang dijalani oleh mereka sehari-harinya nanti.

4. Mendorong pemakaian sumber daya lokal agar menjadi produk unggulan daerah

Adanya pengetahuan tentang pentingnya pemakaian sumber daya lokal terhadap pasar sangat penting adanya, sebab dipasarlah dapat diterapkan bagaimana bisa mengembangkan produk lokal bisa menjadi produk unggulan daerah. Dengan begitu jika produk daerah menjadi produk unggulan dan menjadi icon suatu daerah maka akan berdampak baik pula terhadap perekonomian yang dijalani, produk yang dihasilkan akan dapat dengan mudah dipasarkan dan membantu dalam kelancaran kegiatan perekonomian pelaku usaha.²

Berdasarkan paparan data diatas pemerintah sudah mengupayakan bagaimana perekonomian daerah tetap berjalan dengan lancar dengan memberikan pengetahuan kepada para pelaku usaha untuk menggunakan produk lokal agar bisa menjadi produk unggulan daerah, dengan adanya produk lokal yang bisa menjadi produk unggulan daerah maka akan banyak memberikan kontribusi terhadap jalannya perekonomian masyarakat itu sendiri. Mulai dari pedagang pasar kemudian pemilik produk umkm yang dibantu pengembangannya oleh pemerintah dan diharapkan mampu

² Abdullah Pitter, *Daya Saing Daerah: Konsep Pengukuran di Indonesia* (Yogyakarta: BPFE, 2002), 47.

memberikan pekerjaan dan penghasilan kepada warga sekitar sehingga dapat terciptanya perekonomian yang baik.

C. Analisis Dampak Kebijakan Pemerintah Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Berdasarkan data diatas menurut analisis peneliti menunjukkan bahwa pemerintah sudah cukup berupaya dalam membantu mengentaskan pasar tradisional dari keterpurukan ditengah banyaknya pasar modern. Sehingga dalam penerapannya meskipun membutuhkan banyak kerjasama antara pemerintah dan pelaku usaha sehingga usaha yang dijalankan dalam kebijakan pemerintah ini dapat dilakukan semaksimal mungkin meskipun masih ada yang kurang maksimal dalam pengerjaannya. Dalam islam pemerintah diibaratkan sebagai khalifah, dimana pemerintah memimpin masyarakatnya dalam menjalankan kebijakan yang telah dibuat untuk mensejahterakan dan memberikan kehidupan yang baik untuk semua umatnya.³ Dengan demikian sebagai pemimpin yang baik maka pemerintah juga harus menjalankan nilai-nilai keislaman sesuai dengan norma islam yang berlaku. Bersifat adil kepada semua masyarakatnya dan mensama ratakan informasi atau apapun yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakatnya sangat perlu dilakukan agar tidak ada yang merasa dirugikan dalam hal apapun.

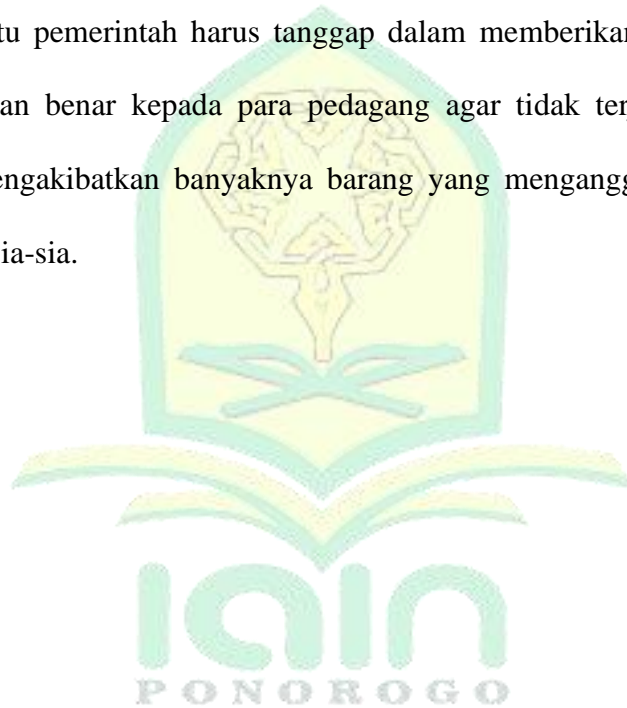
Dalam pengambilan keputusan pemerintah harus menggunakan sistem musyawarah sebagai salah satu mekanisme penting dalam islam.

³ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 59.

Pemerintah wajib menjalankan amanah yang telah diemban sehingga dampak yang nantinya akan timbul setelah pemerintah melakukan keijkannya dengan baik maka akan timbul dampak yang baik pula, namun jika pemerintah dalam menjalankan amanahnya tidak sesuai dengan syariat islam dan dalam mengambil keputusan tidak dengan melakukan musyawarah maka akan terjadilah kesalahfahaman antar pelaku usaha dan pemerintah dengan dalih pemerintah tidak adil dalam menjalankan kebijakan yang telah dibuat.

Ada dua dampak yang ditimbulkan oleh adanya kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah ini, yang pertama dampak baik yang dihasilkan dari kebijakan pemerintah adalah adanya sarana dan prasarana yang diberikan kepada pengguna pasar sehingga terciptalah kenyamanan pengguna pasar seperti pembeli dalam berbelanja dan dari situlah terciptanya perasaan senang berbelanja dipasar tradisional sehingga dengan bertahannya konsumen atau pembeli tetap dipasar dapat menaikkan lagi perekonomian di pasar tradisional. Kemudian adanya pelatihan yang dibuat oleh pemerintah berdampak baik untuk pedagang pasar legi, menjadikan pedagang yang lebih cerdas, tangguh, dan tidak mudah terpengaruh kepada hal-hal buruk yang kemungkinan akan terjadi kedepannya. Untuk dampak buruk yang terjadi setelah adanya kebijakan pemerintah ini adalah adanya informasi yang tidak akurat yang mengakibatkan banyaknya pedagang yang merasakan dirugikan seperti halnya penginformasian mengenai stabilisasi harga, pedagang tidak

mengetahui informasi dan tetap menyediakan barang sesuai stok yang ada, namun ketika terjadinya kenaikan atau penurunan yang drastis maka barang yang telah tersedia akan menjadi menganggur dan terjadilah inflasi yang menyebabkan kerugian. Kerugian tersebut sangat dirasakan oleh pedagang, namun pembeli juga merasa dirugikan sebab mereka mengetahui informasi mengenai harga barang melalui pedagang namun pada kenyataannya mereka tidak mengetahui informasi apapun. Oleh karena itu pemerintah harus tanggap dalam memberikan informasi yang akurat dan benar kepada para pedagang agar tidak terjadinya kerugian yang mengakibatkan banyaknya barang yang menganggur dan terbuang dengan sia-sia.



BAB V

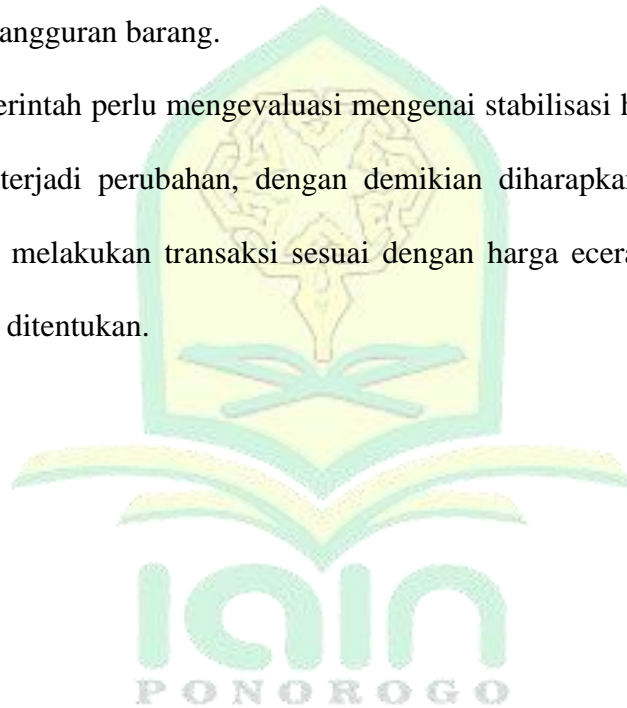
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Pemerintah atau Dinas Industri dalam menjalankan kebijakan yang telah dibuat sebagian ada yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan keadaan fakta dilapangan, namun masih ada kebijakan yang dibuat namun belum berjalan secara maksimal. Dua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu kebijakan alokasi dan kebijakan relokasi.
2. Strategi yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah mencakup beberapa hal pemanfaatan teknologi dalam memperoleh dan memberikan informasi, mewujudkan adanya sarana dan prasara yang disediakan untuk kenyamanan pengguna pasar legi, pengembangan kemampuan usaha sehingga dengan adanya program pengembangan dan pengadaan pelatihan diharapkan pedagang bisa menjadi pedagang yang lebih tangguh, mendorong pemakaian produk lokal agar menjadi produk unggulan daerah.
3. Kebijakan pemerintah selain memberikan dampak positif untuk pedagang pasar legi tetapi juga terdapat dampak negatif yang terjadi didalamnya.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Ponorogo Khususnya Dinas Perdagangan diharapkan mampu mempertahankan program yang telah terlaksanakan, agar bisa terus mensejahterakan pelaku usaha.
2. Pemerintah diharapkan lebih akurat dalam pemberian informasi kepada pelaku usaha atau pedagang pasar sehingga ketika terjadi kenaikan atau penurunan harga secara drastis tidak mengakibatkan pengangguran barang.
3. Pemerintah perlu mengevaluasi mengenai stabilisasi harga yang sering kali terjadi perubahan, dengan demikian diharapkan para pedagang tetap melakukan transaksi sesuai dengan harga eceran tertinggi yang telah ditentukan.



DAFTAR PUSTAKA

Daftar Buku

- AL-Haritsi, Jaribah bin Ahmad AL-Haritsi. *Fikih Ekonomi Umar bin AL-Khatab*. Jakarta: Khalifah, 2006.
- Amirudin. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Andi Bastomi, Hapi. *Sejarah Para Khalifah*. Bogor: Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2006.
- Azwar Karim, Adiwarmanto. *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Azwar Karim, Adiwarmanto. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Azwar Karim, Adiwarmanto. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2005.
- Edwin Nasution, Mustafa. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Fahmi, Irham. *Manajemen Kinerja: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Firmansyah, M. Anang. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Ghofur, Abdul. *Pengantar Ekonomi Syariah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Haider Navqi, Nawab. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Hamzah, Fahri. *Negara Pasar dan Rakyat*, Cet. 11. Jakarta: Yayasan Faham Indonesia, 2011.
- Hendrianto. *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Johan Setiawan, Albi Anggito. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi : CV Jejak, 2018.
- Kartasmita, Ginanjar. *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: PT Pusaka Cidesendo, 1997.
- Kusuma Dewi, Indah. *Nilai-Nilai Profektif Dalam Kepemimpinan Modern pada Manajemen Kinerja*. Yogyakarta: CV Gre Publishing, 2019.
- Kusuma Dewi, Indah. *Nilai-Nilai Profektif Dalam Kepemimpinan Modern Pada Manajemen Kinerja*. Yogyakarta: CV Gre Publishing, 2019.
- Lexy J Meloeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1998.
- Lukman Nugroho, Ahmad. *Pengembangan Pasar Tradisional Songgolangit Ponorogo*. Ponorogo: Universitas Darussalam Ponorogo, 2018.

- Mangkuprawira, Syafri. *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik*. Bogor: Perbit Ghalia Indonesia, 2014.
- Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Publishing, 2018.
- Mashuyhuri. *Ekonomi Mikro*. Malang : UIN Malang Perss, 2007.
- Mifta,Thoha. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Muhammad. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Muluk, Khairul. *Desentralisasi Pemerintah dan Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing, 2009.
- Mulyadi,Deddy. *Sistem Kepemimpinan Budaya Organisasi dan Manajemen Mutu Untuk Peningkatan Kinerja Organisasi Publik*. Bandung: Mutiara Ilmu, 2006.
- Mulyadi. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Nawawi, Hadari. *Administrasi personil Untuk Peningkatan Produktivitas Kerja*. Jakarta: CV Haji Masagung, 2000.
- Nejatullah Siddiqi, Muhamad. *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, cet, III. Jakarta: BumiAksara, 2004.
- Nejatullah Siddiqi, Muhammad. *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*. Jakarta : Bumi Kasara, 1991.
- Nizaruddin. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Idea Sejahtera, 2013.
- Pitter, Abdullah. *Daya Saing Daerah: Konsep Pengukuran di Indonesia*. Yogyakarta:BPFE, 2002.
- Porter. *Strategi Bersaing: Teknik menganalisis Industri dan Pesaing*. Jakarta: Erlangga, 1997.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Univ. Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*. Cet.4; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Qardawi,Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani, 1997.
- Riniwati,Harsuko. *Manajemen Sumber Daya Manusia Aktivitas Utama dan Pengembangan SDM*. Bandung: UB Press,2016.
- Riusmawati, Mattalata. *Evaluasi Kinerja Penilaian Kinerja Atas Dasar Prestasi Kerja Berorientasi Kedepan*. Makassar: Celebes Media Perkasa, 2018.
- Rosyidi,Suherman. *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sarwono, Jonatan. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006.
- Sarwono, Jonatan. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Siagian, Sondang. *Kiat Meningkatkan Produktivitas kerja*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.

- Simamora, Bilson. *Panduan Riset perilaku Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Sugiono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Sujono, Asep. *Manajemen Ritel Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Sukarno Wibowo & Dedi Supriad. *Ekonomi Mikro Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Sukirno, Sadono. *Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah, dan dasar Kebijakan*. Jakarta: LPFE UI, 1987.
- Suparmoko. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Penerbit BPFE Jogjakarta, 1985.
- Suparmoko. *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, Edisi 1. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2002.
- Suryana. *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan*. Jakarta: Salemba Empat, 2000.
- Syafei, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pusaka Setia, 2000.
- Syafrudin, Ateng. *Butir-Butir Gagasan Tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996.
- Syafrudin, Ateng. *Pengaturan Koordinasi Pemerintah Daerah*. Bandung: Tarsito, 1976.
- Usman, Husaini. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara, 2008.
- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo, 2002.
- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo, 2002.

Daftrar Jurnal dan skripsi

Asih Lestari, Ramon. “Pengembangan Pasar Rakyat di Kabupaten Banyumas,” *Skripsi*, Purwokero: IAIN Purwokerto, 2017.

Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo didalam <https://indakop.ponorogo.go.id/indakop-ponorogo-go-id/visi-misi-2>. diakses pada tanggal 5 april 2022, jam 21.00.

DISPERDAGKUM, Relokasi Pasar Legi Ponorogo. Diakses pada Mei 2022, dari Indakop Ponorogo: <https://indakop.ponorogo.go.id/relokasi-pasar-legi-ponorogo-di-eks-rsud/>.

Hakim, Lukmanul. “Distorsi Pasar dalam Pandangan Ekonomi Islam”, *Ekomandia*, Volume 1, Nomor 1, 2019.

- Hakim, M. Arif. "Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar", *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis*, Volume 8, Nomor 1, 2019.
- Handriyan, Defri. "Peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dalam Mewujudkan Kebersihan Dan Ketertiban Pasar Di Kota Pekanbaru," *Skripsi*, Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.
- Kabupaten Ponorogo-wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia, https://id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten_ponorogo. diakses pada tanggal 5 april 2022, jam 14.00.
- Lestari, Monika. "Peran Pemerintah dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Pasar Tradisional di kabupaten Bantul," *Skripsi*, Bantul: Universitas Gadjah Mada Bantul, 2017.
- Letak Geografis, <https://putrinuruljannah.wordpress.com/profil-2/geografis/>. diakses pada tanggal 5 april 2022, jam 14.30.
- P.D.K Ponorogo, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro
- Poesoro, Adri. "Pasar Tradisional di Era Persaingan Global", *Buletin Lembaga Penelitian SMERU*, Volume 1 Nomor 2. 2007.
- Sahriana Darti, Besse. "Pemerintah dan Penguatan Ekonomi Masyarakat dalam Merekonstruksi Pasar Tradisional di Kabupaten Wajo," *skripsi*, UIN Alauddin Makassar, 2019.
- Sarwoko, Endi. "Dampak Keberadaan Psar Modern Terhadap Kinerja Pasar Tradisional di Wilayah Kabupaten Malang", *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, Volume 4, Nomor 2, 2008.
- Sejarah pasar legi songgolangit Ponorogo, <https://situsbudaya.id/sejarah-pasar-legi-songgolangit-ponorogo/>. diakses pada tanggal 5 april 2022, jam 13.30.
- Sumarni, "Intevensi pemerintah Antara Penolakan dan Kebutuhan Ekonomi, *Jurnal of Islamic and Economic Education*, Volume 1, Nomor 2. 2019.
- Visi Misi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, <https://ponorogo.go.id/profil/visi-misi/>. Diakses pada tanggal 29 Agustus 2022, jam 09.45.